



# PERDAGANGAN SATWA LIAR, KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DAN PERLINDUNGAN SPESIES DI INDONESIA: KONTEKS KEBIJAKAN DAN HUKUM CHANGES FOR JUSTICE PROJECT

**6 Maret 2015**

Publikasi ini disusun untuk ditinjau oleh United States Agency for International Development.  
Publikasi ini disiapkan untuk Chemonics Inc. oleh Indonesian Program, Wildlife Conservation Society.



# PERDAGANGAN SATWA LIAR, KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DAN PERLINDUNGAN SPESIES DI INDONESIA: KONTEKS KEBIJAKAN DAN HUKUM CHANGES FOR JUSTICE PROJECT

**Kontrak No. DFD-I-00-08-00070-00**

**Task Order 2, di bawah Encouraging Global Anticorruption and Good Governance Efforts/Mendorong Antikorupsi Global dan Upaya Pemerintahan yang Baik (ENGAGE) Indefinite Quantity Contract/Kontrak Kuantitas Tidak Terbatas (IQC)**

Laporan ini didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat dan dikelola oleh U.S Agency for International Development sebagai bagian dari Proyek Changes for Justice (C4J). Laporan ini disusun untuk Chemonics oleh Indonesian Program, Wildlife Conservation Society. Pandangan penulis dalam artikel tidak mencerminkan pandangan dari Pemerintah Amerika Serikat.

## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH .....	1
RINGKASAN .....	1
KATA PENGANTAR .....	4
METODOLOGI .....	6
KERANGKA PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA .....	6
KEBIJAKAN, UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TURUNAN YANG RELEVAN	8
Undang-undang Lingkungan Hidup .....	9
UU No.32/2009 .....	9
Undang-undang Konservasi dan Kehutanan .....	10
UU No.5/1990: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .....	10
UU No.16/1992: Karantina Tanaman, Ikan dan Binatang .....	12
UU No.41/1999: Kehutanan.....	12
UU No. 18/2013: Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	13
Undang-Undang Kelautan dan Perikanan .....	13
UU No.27/2007, sehubungan dengan UU No.1/2014: Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil .....	13
UU No. 31/2004 sehubungan dengan UU No.45/2009: Perikanan.....	14
UU No.32/2014: Kelautan.....	14
Undang-undang Lainnya .....	14
UU No. 15/2002 dan UU No.8/2010: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	14
UU No. 20/2001: Pemberantasan Korupsi .....	15
Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati dan Spesies.....	15
CITES, PERLINDUNGAN DAN PERDAGANGAN SPESIES .....	17
Konvensi Internasional Mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang Hampir Punah (CITES) .....	17
Undang-Undang tentang CITES di Indonesia .....	18
Peraturan Pemerintah No. 7/1999: Daftar Spesies yang Dilindungi.....	20
Implementasi CITES di Indonesia.....	20
Pengaturan Pengelolaan CITES untuk spesies laut .....	21
KERANGKA INSTITUSI UNTUK PENEGAKAN DAN IMPLEMENTASI .....	23
Payung Struktur Institusi .....	23
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	23
Penyidikan Pidana terhadap satwa liar .....	24
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	27
Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	28

KESENJANGAN DAN TANTANGAN UTAMA .....	29
Cakupan Hukum .....	29
Deteksi dan Pelaporan .....	31
Penangkapan dan Penahanan .....	32
Pendaftaran Kasus dan tuntutan .....	33
Implementasi dan Penyelenggaraan .....	34
TEMUAN KAJIAN .....	36
Reformasi Peraturan dan Kebijakan .....	36
Peraturan Menteri .....	36
Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati dan Spesies .....	37
Reformasi Hukum .....	37
UU No.5/1990 .....	37
UU No. 26/2007, Peraturan Pemerintah No. 26/2008 .....	40
No. 31/2004 - Perikanan .....	40
Implementasi .....	41
Pencegahan berbasis lapangan .....	42
Membangun kapasitas di sektor peradilan .....	42
Mencocokkan tantangan dan rekomendasi .....	44
KESIMPULAN .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN .....	50
Ringkasan kasus kejahatan terhadap satwa liar dan hasilnya .....	50

Gambar 1. Undang-undang utama yang relevan dengan Kejahatan terhadap satwa liar dan Konservasi Keanekaragaman di Indonesia .....	9
Gambar 2. Area Pelestarian Alam di Indonesia .....	11
Gambar 3. UU No. 5/1990 dan Peraturan Turunan .....	12
Gambar 4. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati di Indonesia .....	16
Gambar 5. Proses Penegakan Hukum untuk kejahatan dan pelanggaran administratif (Suryadi, <i>et.al.</i> , 2007) .....	25
Gambar 6. Jenis Kejahatan dan Hukuman Maksimum berdasarkan Undang-Undang Konservasi, Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup .....	25
Gambar 7. Proses penanganan perkara kehutanan/satwa liar .....	28

## UCAPAN TERIMA KASIH

WCS mengucapkan terima kasih atas kontribusi penting dan arahan dari Samedhi, Indra Eksploitasi, Suer Suryadi, dan Harry Alexander dalam penyusunan laporan ini.

## RINGKASAN

Salah satu penyebab utama dari penurunan spesies di Indonesia adalah eksploitasi berlebihan. Walaupun perkiraan bervariasi, perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per tahun, yang mencerminkan kerugian besar perekonomian Indonesia, dan kerugian yang menghancurkan warisan budaya dan lingkungan Indonesia. Meskipun sudah ada kerangka hukum dan peraturan turunan yang menyeluruh dan dirancang untuk mencegah kerugian, namun para pemburu gelap, pedagang, pengirim dan pembeli satwa liar masih dapat menghindari proses hukum berupa penangkapan, penyidikan, dan tuntutan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas dari polisi hutan, polisi dan sistem peradilan dalam menegakan peraturan yang berlaku, dan dengan memanfaatkan sejumlah celah hukum yang masih ada. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap kerangka kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan satwa liar di Indonesia, yang mencakup kerangka nasional terkait pelaksanaan CITES, rincian celah dan inkonsistensi peraturan dan prakteknya, kesenjangan antara penegakan hukum dan keputusan pengadilan, dan peluang-peluang perbaikan kebijakan dan peraturan di Indonesia untuk memberantas perdagangan satwa liar secara efektif.

Rekomendasi dari kajian ini dapat dibagi menjadi dua bagian penting: (1) perbaikan kerangka hukum dan/atau kebijakan yang ada dan perencanaan yang mengacu pada hal tersebut, yang dapat mencakup pengembangan undang-undang baru, kebijakan atau perencanaan; dan (2) perbaikan atau amandemen terhadap cara pelaksanaan kerangka hukum tersebut.

Beberapa peluang-peluang yang penting untuk perubahan berbagai undang-undang telah diidentifikasi, terutama terkait dengan UU No.5/1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang mencakup:

- i. Melakukan revisi peraturan perlindungan spesies yang disesuaikan dengan daftar CITES; memastikan bahwa spesies yang bukan berasal dari Indonesia tapi termasuk dalam daftar CITES (misal. Gajah Afrika Gading) mendapat perlindungan sama dengan spesies asli Indonesia; memperbarui daftar spesies yang dilindungi dan pertimbangan untuk mengelompokkan spesies kedalam tiga status perlindungan: (1) spesies dilindungi, yang mencakup spesies yang hampir punah dan terancam punah dan semua spesies di Lampiran I CITES; (2) spesies yang dikontrol ketat, yang mencakup spesies yang rentan terhadap perdagangan dan spesies di Lampiran II CITES; dan (3) spesies yang perdagangannya harus dipantau;
- ii. Menghubungkan perlindungan satwa dan perlindungan habitat untuk memastikan bahwa degradasi hutan dihentikan, mungkin melalui penetapan “batas minimum habitat yang kritis” untuk spesies yang terancam punah. Pelestarian habitat ini harus dihubungkan dengan upaya yang sedang berjalan untuk memperbaiki perencanaan tata ruang wilayah, dan adanyakemungkinan perubahan kebijakan-kebijakan tata wilayah ditingkat provinsi;

- iii. Denda yang lebih tinggi dan sanksi minimum dan maksimum, termasuk sanksi pidana seperti penjara, denda, pencabutan hak sipil tertentu, dan perampasan dan penyitaan; dan
- iv. Meningkatkan wewenang polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil, meningkatkan pelatihan dan memastikan bahwa ada ketentuan dan peraturan yang baru sehubungan dengan perdagangan online dan penggunaan barang bukti elektronik.

Sebagai tambahan, Indonesia mempunyai beberapa kebijakan keanekaragaman hayati, peraturan turunan dan rencana-rencana aksi yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai rencana aksi keanekaragaman yang telah dikembangkan dan rencana pengelolaan spesies khusus. Hal-hal ini seringkali tumpang tindih, tidak punya wewenang pengelolaan yang jelas, atau kekurangan sumber daya. Rencana aksi untuk spesies khusus, misalnya, seringkali kurang dimanfaatkan, dan seharusnya bisa disertakan lebih jauh ke dalam aksi dan kegiatan pemerintah, sambil memastikan bahwa aksi dan kegiatan tersebut mempunyai sumber daya yang cukup dan sejalan dengan prioritas pemerintah.

Kurangnya fokus terhadap upaya-upaya yang mendukung dan memungkinkan pelaksanaan kerangka hukum yang lebih efektif. Contohnya adalah tindakan-tindakan pencegahan yang bisa lebih dulu membatasi atau menghentikan perdagangan satwa liar, masih kurang menjadi focus. Upaya pencegahan yang efektif memerlukan penggunaan upaya yang tidak represif, sehingga berdampak pada biaya yang lebih rendah, dan harus diberikan prioritas lebih dalam upaya penegakan hukum. Rekomendasi yang diberikan termasuk:

- i. Peningkatan prioritas upaya pencegahan di lapangan untuk mengurangi insiden konflik dengan satwa liar, dan untuk membatasi perburuan serta perambahan hutan;
- ii. Membangun kapasitas penyidik pegawai negeri sipil, meningkatkan koordinasi mereka, dan memperluas wewenang polisi hutan untuk menyelidiki dan menahan tersangka kejahatan terhadap satwa liar;
- iii. Penerapan pendekatan “*multi-door*” dalam penuntutan, sehingga menerapkan beberapa tuduhan kepada beberapa terdakwa, menelusuri kegiatan ilegal dari tersangka ke pelaku kejahatan utama, dan menggunakan UU alternative dimana masa hukuman lebih lama dan denda lebih besar untuk meningkatkan efek jera; dan
- iv. Peningkatan pertukaran data dan informasi dan kerjasama internasional yang membantu menghentikan kejahatan terhadap satwa liar. Data dan informasi memegang peranan penting dalam menyukseskan penegakan hukum. Protokol pertukaran data perlu dikembangkan pada tingkat nasional dan internasional, dan kolaborasi internasional perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi penyidikan dan ekstradisi tersangka.

Secara singkat, terdapat sejumlah peluang penting yang ada untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Walaupun reformasi hukum dibutuhkan untuk memberikan dasar yang solid untuk upaya penegakan hukum dan memastikan kerangka hukum di Indonesia mampu untuk menanggulangi bentuk kejahatan yang makin berkembang dan semakin canggih ini, namun banyak yang dapat segera dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan meningkatkan tingkat kesuksesan tuntutan. Sukses besar yang terjadi baru-baru ini, seperti penyitaan lebih dari 7,000 kura-kura

moncong babi di pelabuhan Indonesia yang akan dikirim ke Cina<sup>1</sup>, sebagian besar merupakan hasil dari peningkatan hubungan dan kerjasama antara bea cukai, kepolisian dan penyidik khusus. Kesuksesan tersebut adalah indikasi cepatnya dampak perbaikan dalam upaya penegakan hukum. Bersamaan dengan reformasi hukum yang dijelaskan dalam laporan ini, kesuksesan seperti diatas memungkinkan Indonesia untuk membuat terobosan yang ampuh dalam mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan satwa liar di masa datang.

---

<sup>1</sup> <http://www.traffic.org/home/2015/1/23/more-than-2300-turtles-seized-at-jakarta-international-airpo.html>

## KATA PENGANTAR

Perdagangan ilegal flora dan fauna (selain ikan dan kayu) diperkirakan oleh berbagai sumber bernilai sebesar US\$ 7-23 milyar dolar per tahun<sup>2</sup> dan US\$ 2.5 milyar di Asia Timur dan Pasifik saja,<sup>3</sup> dan telah menyebabkan penurunan dan kepunahan lokal banyak spesies di Asia Tenggara, termasuk spesies yang ada di dalam area yang dilindungi. Perdagangan ini mencakup banyak jenis spesies termasuk serangga, reptil, amfibi, ikan dan mamalia. Perdagangan ini juga mencakup spesies yang sudah mati maupun masih hidup dan produk turunannya, yang digunakan untuk obat-obatan, makanan, hewan peliharaan, dan ornamen atau obat tradisional. Semua ini mempunyai nilai yang besar tidak hanya di pasar gelap, tapi juga terhadap ekonomi nasional jika dikelola secara berkesinambungan. Kebanyakan dari perdagangan ini sangat terorganisir dan menguntungkan sekelompok pelaku tindakan kriminal, sementara merugikan negara berkembang sebesar milyaran dolar dalam bentuk hilangnya pendapatan dan peluang pembangunan.

Indonesia adalah salah satu dari 10 besar negara “mega-diversivitas” dan pemasok terbesar produk satwa liar di Asia, baik secara legal maupun ilegal. Meskipun hanya menempati 1.3% permukaan bumi, Indonesia mempunyai 12% mamalia dunia, 7.3% amfibi dan reptil dunia, dan 17% burung-burung dunia. Dari jumlah ini, 1,225 spesies fauna dan flora terancam punah dalam skala global<sup>4</sup>, urutan keempat terbanyak dibanding negara-negara lainnya, termasuk mamalia (185 spesies, lebih dari semua negara lain di dunia), burung (131 spesies, kedua terbesar di dunia), amfibi dan reptil (64 spesies), ikan (149 spesies), moluska dan invertebrata lainnya (288 spesies), dan tanaman (408 spesies).

Di Indonesia, salah satu penyebab terbesar penurunan jumlah spesies, khususnya sekitar sepertiga spesies burung dan mamalia dan semua spesies reptile, adalah eksploitasi berlebihan. Di negara kepulauan ini, spesies penting termasuk harimau, badak, gajah, orangutan, burung, beruang, anggrek, ikan laut dan air tawar, kura-kura, kayu wangi (gaharu), trenggiling, karang, ular, kelelawar, hiu, dan tikus diburu dan diperdagangkan dalam jumlah besar. Perdagangan satwa liar adalah ancaman terbesar (bersamaan dengan hilangnya habitat) untuk Badak Sumatera (hampir punah; populasi 100-120 ekor), Harimau Sumatera (hampir punah; 650 ekor), Gajah Asia (terancam punah) dan Trenggiling Sunda (terancam punah). Karena keadaan geografis dan status sebagai negara dagang besar, Indonesia juga merupakan sumber besar, tujuan, dan tempat transit untuk penyelundupan dan penyembunyian satwa liar, seperti gading Gajah Afrika. Konsekuensi dari perdagangan yang tidak berkesinambungan adalah ancaman besar pada satwa liar yang mempunyai nilai global yang penting. Nilai dari perdagangan ilegal di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai US\$ 1 milyar per tahun. Jika perdagangan legal yang tidak berkesinambungan juga dihitung, nilai ini melonjak sangat tinggi, yang berarti kerugian besar dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

<sup>2</sup> Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash, N., Mrema, E. (Eds). 2014. The Environmental Crime Crisis – Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal, [www.grida.no](http://www.grida.no).

<sup>3</sup> UNODC. 2013. Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific. A threat assessment. United Nations Office on Drugs and Crime.

<sup>4</sup> IUCN (2014). *The IUCN Red List of Threatened Species version 2014.3*. Tabel 5 – Jumlah spesies yang terancam (Hampir Punah, Terancam Punah dan Rentan) di dalam setiap kelompok organisme berdasarkan negara. <http://www.iucnredlist.org>. Diakses pada Januari 2015.

Bukti juga menunjukkan adanya penurunan spesies yang dulunya tidak terancam punah dan diperdagangkan secara legal di pasar domestik Indonesia, seperti Burung Murai Batu dan Cucak Rawa, yang saat ini jumlah spesiesnya telah menurun hingga hampir punah didalam taman nasional yang dinyatakan dalam keadaan stabil. Perdagangan tersebut tidak hanya berdampak langsung ke spesies; penghilangan komponen penting ekologi dapat merusak keseluruhan integritas ekosistem. Hal ini diperparah ketika suatu spesies yang dipindahkan dari habitatnya, memainkan peran penting di ekosistem tersebut, seperti gajah dan harimau.

Di Indonesia, perburuan dilakukan oleh masyarakat lokal dan kelompok pemburu, beberapa kelompok bermigrasi ke Indonesia karena beberapa spesies bernilai tinggi telah punah di negara-negara lain (misal. Harimau dan badak sudah punah di Kamboja, Laos dan Vietnam). Harimau juga kemudian diperdagangkan pada saat tertangkap ketika konflik dengan manusia. Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Masyarakat lokal menanggung semua akibat, termasuk hilangnya satwa liar, potensi pendapatan wisata dan gangguan sosial dan ekologi yang ditimbulkan oleh kelompok pemburu. Perdagangan cula badak (1 kg bernilai ribuan US Dolar) dan trenggiling sebagian besar berskala internasional, ke Asia Timur (Vietnam dan Cina). Perdagangan harimau dan gading (Asia dan Afrika) berskala domestik dan antar negara; kulit harimau dan gading dianggap sangat berharga oleh kalangan elit di Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak kelompok pecinta satwa, yang dijalankan oleh individu yang memelihara spesies, termasuk spesies yang dilindungi seperti kukang atau beberapa jenis burung. Kelompok-kelompok ini sering memperdagangkan atau bertukar hewan secara online atau pada saat pertemuan tertutup.

Sangat sedikit penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap satwa liar rata-rata 100 kasus per tahun antara tahun 2005-2009, yang kemudian turun ke angka 37 kasus di tahun 2010 dan 2012, dan hanya 5 kasus pada tahun 2013. Penurunan ini dapat menyesatkan, dengan estimasi penyelundupan satwa liar diperkirakan meningkat (Samedi, 2015, *pers comm*). Pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia terhalang oleh terbatasnya kemauan politis dan kolaborasi antara lembaga penegakan hukum dan pelaksanaan prosedur penegakan hukum yang tidak tepat.

Terdapat juga celah-celah hukum dan inkonsistensi yang menghalangi kesuksesan dari suatu proses tuntutan. Misalnya, di wilayah Indonesia, perdagangan dan penjualan Gading Gajah Afrika dan harimau bukan asli Indonesia dan bagian tubuh badak diperbolehkan. Reformasi hukum, memperkuat lembaga penegakan hukum pemerintah, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan membangun kesadaran hukum dan peraturan, merupakan hal sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Tujuan dari laporan ini adalah melakukan *desk review* untuk menganalisa kebijakan, kerangka hukum dan peraturan yang ada saat ini dan terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar. Laporan ini mencakup analisa terhadap payung hukum dan peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), celah atau inkonsistensi peraturan dan pelaksanaannya serta kesenjangan dalam penegakan hukumnya. Laporan ini ditutup dengan sejumlah rekomendasi mengenai peluang-peluang untuk melakukan reformasi kebijakan dan peraturan di Indonesia untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar secara efektif.

## METODOLOGI

Penelitian untuk analisa ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Pendekatan metodologis berpusat pada *desk review* dari sejumlah peraturan, hukum, dan yurisprudensi yang ada, dan analisa materi hukum yang relevan dengan kejahatan dan perdagangan satwa liar, dan lebih luas lagi pada perlindungan dan konservasi lingkungan. Walaupun tidak memungkinkan untuk melakukan analisa menyeluruh pada setiap hukum dan peraturan yang mungkin relevan sesuai dengan cakupan laporan ini, payung hukum, peraturan turunan dan kebijakan, sesuai dengan yang ditentukan kontributor ahli, telah dimasukkan dalam laporan ini dan telah melalui proses rujukan silang.

*Desk research* awal didukung oleh sejumlah wawancara dengan staf penting pemerintah di berbagai lembaga, dengan data yang dikumpulkan dari upaya penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar berbasis lapangan dan saran oleh ahli hukum teknis dari pengacara dengan spesialisasi dalam bidang ini. Pekerja lapangan Unit Kejahatan terhadap satwa liar WCS memberikan keterangan langsung mengenai tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegakan hukum dilapangan. Akhirnya, pejabat senior pemerintahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan juga terlibat dengan pembuatan tulisan final, dan dalam meninjau rekomendasi laporan dan temuan penting.

## KERANGKA PAYUNG HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA

Undang-undang Dasar Indonesia (1945) dan Pancasila<sup>5</sup> memberikan kerangka payung hukum dan dasar bagi seluruh undang-undang dan norma di Indonesia (Soeprapto, 1998). Undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk konservasi satwa liar, sebagian besar berasal dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar, ayat 3 dan 4:<sup>6</sup>

*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”...*

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional.*

Amandemen kedua dari Undang-Undang Dasar juga mendukung hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.<sup>7</sup> Hal ini memberikan dasar bagi undang-undang dan kebijakan yang mengatur pengelolaan berkelanjutan atas sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Kerangka hukum nasional yang diatur dalam Undang-undang No. 12/2001 (menggantikan Undang-Undang No. 10/2004), mengenai Pengembangan Undang-undang dan Peraturan. Peraturan turunan tidak dapat berbeda dengan atau menggantikan hukum yang bersifat lebih tinggi, dan hirarki undang-undang adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dasar filosofi Indonesia terdiri dari lima prinsip moral: 1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*; 2) *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*; 3) *Persatuan Indonesia*; 4) *Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*; dan 5) *Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia*.

<sup>6</sup> Amandemen keempat di Undang-undang 2002.

<sup>7</sup> Bab XA, Pasal 28H, Ayat 1).

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang – Undang-undang tertinggi dalam hirarki peraturan. Undang-undang atau peraturan ini dapat memberikan hukuman seperti hukuman penjara, denda, atau sanksi administratif, dan bersifat mengikat secara hukum;<sup>8</sup>
- Peraturan Pemerintah – digunakan untuk melaksanakan Undang-undang;
- Peraturan Presiden – digunakan untuk melaksanakan Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah. Menteri dapat mengeluarkan peraturan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan hukum yang bersifat lebih tinggi; dan
- Peraturan Daerah (tingkat Provinsi/Kota).

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari pembuat keputusan melalui perundang-undangan dan peraturan, konstitusi di Indonesia menjamin hak konstitusi warga negara untuk meminta tinjauan judicial dari setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Tinjauan judicial adalah hak untuk memeriksa keabsahan undang-undang/peraturan dengan membandingkan dengan Undang-undang yang bersifat lebih tinggi. Terdapat dua jenis tinjauan judicial: (1) tinjauan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, dibawah wewenang Mahkamah Konstitusional;<sup>9</sup> dan (2) tinjauan peraturan terhadap peraturan yang bersifat lebih tinggi, dibawah wewenang Mahkamah Agung.<sup>10</sup> Misalnya, Peraturan Kementerian Kehutanan menetapkan Taman Nasional Batang Gadis ditinjau dengan Undang-undang No.41/1999, oleh Mahkamah Agung atas permintaan perusahaan tambang di dalam kawasan taman nasional tersebut.

---

<sup>8</sup> Terdapat dua macam undang-undang yang mengatur sanksi pidana adalah UU dan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten). Maksimum sanksi pidana di peraturan daerah adalah 6 bulan penjara atau denda 50.

<sup>9</sup> *vide*: 3<sup>rd</sup> Amandemen UUD 1945, Pasal 24 C Ayat I dan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Agung, Pasal 10, ayat I huruf a.

<sup>10</sup> *vide*: 3<sup>rd</sup> Amandemen UUD 1945, Pasal 24 Ayat 1 dan UU No. 14 of 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31.

## **KEBIJAKAN, UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TURUNAN YANG RELEVAN**

Lahan di Indonesia dikelompokkan ke dalam dua kegunaan, Area Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL). Area Hutan termasuk dalam yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan undang-undang konservasi dan kehutanan memberikan dasar untuk menerbitkan izin untuk pengelolaan area hutan dan perubahan fungsi hutan. Lahan yang dialokasikan untuk kepentingan lain termasuk dalam yurisdiksi Badan Pertanahan Nasional dengan Undang-undang Agraria/Tanah yang memberikan dasar untuk menerbitkan hak tanah dan perubahan hak tanah. Semua pengembangan, pertanian, perkebunan dan aktivitas bisnis lainnya hanya dapat dilakukan di “lahan yang dialokasikan untuk kegunaan lain”. Dengan persetujuan yang sesuai, Area Hutan dapat diubah menjadi “lahan untuk kegunaan lain” dan sebaliknya.

Berdasarkan Undang-undang Rencana Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (sebelumnya ada di bawah arahan Kementerian Pekerjaan Umum) membagi kategori lahan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan Lindung biasanya dalam bentuk area yang dilindungi dan area hutan, sementara kawasan budidaya biasanya mencakup kategori area penggunaan lain.

Daerah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut ada dibawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kewenangan Kementerian tersebut tumpang tindih dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal kepulauan dan daerah pesisir sehubungan dengan pemberian hak tanah dan izin jika lahan berada dalam Area Hutan. Tumpang tindih kewenangan juga terjadi sehubungan dengan pengelolaan area konservasi yang mencakup tanah/pulau dan laut. Saat ini, terdapat proses yang sedang berjalan untuk menentukan bagaimana cara untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup wilayah laut yang besar seperti taman laut nasional, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Gambar 1. Undang-undang utama yang relevan dengan Kejahatan terhadap satwa liar dan Konservasi Keanekaragaman di Indonesia**



Terdapat juga tumpang tindih antara kewenangan Kementerian sehubungan dengan spesies seperti kura-kura, yang termasuk dalam mandat Undang-undang Perikanan No. 31/2004 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terkait, dan peraturan KLHK mengenai konservasi dan lingkungan.

Tumpang tindih antara kewenangan Kementerian sehubungan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup di tanah, sungai, danau, laut dan udara Indonesia. Undang-undang Lingkungan Hidup sebaiknya dipandang sebagai payung undang-undang, yang berlaku di seluruh sektor dan peraturan turunan. Undang-undang sektoral utama dan peraturan turunan diringkas sebagai berikut.

## Undang-undang Lingkungan Hidup

### UU No.32/2009

UU No. 32/2009, mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, diterbitkan untuk menggantikan UU No. 23/1997, mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dapat dianggap sebagai payung hukum bagi sebagian besar peraturan yang berhubungan dengan sumber daya alam/lingkungan hidup di Indonesia. UU 32/2009 mencakup ayat yang dirancang untuk: mengantisipasi dan memperhitungkan masalah lingkungan hidup global; mendukung pengembangan berkesinambungan dan pemakaian sumber daya alam berkesinambungan; melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari hak

asasi manusia; dan memastikan perlindungan sumber daya hayati dan ekosistem mereka, termasuk pencegahan polusi dan limbah dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. UU ini mengatur perencanaan, penggunaan, kontrol, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum melalui mekanisme berbasis proses peradilan dan non-proses peradilan (misal. Resolusi konflik lingkungan hidup). Kontribusi utama UU No, 32/2009 mencakup definisi wilayah ekologi Indonesia, pengenalan kriteria baru untuk Penilaian Strategis Lingkungan Hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana perlindungan di semua tingkat, dan pengenalan izin lingkungan hidup dan audit sebagai alat untuk mendukung Penilaian Dampak Lingkungan Hidup.

## **Undang-undang Konservasi dan Kehutanan**

### UU No.5/1990: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No.5/1990, mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Hal ini mengatur pelestarian dan konservasi flora dan fauna, ekosistem, wilayah lindung, penggunaan sumber daya alam berkesinambungan, dan menerangkan proses penyidikan, hukuman, dan sanksi bagi kejahatan yang disebutkan dalam UU ini. Namun, pelaksanaan UU No.5/1990 memerlukan diterbitkannya peraturan turunan pemerintah, dimana banyak peraturan tidak pernah diterbitkan. Misalnya, Peraturan Pemerintah untuk Cadangan Biosfer tidak pernah diterbitkan, yang menimbulkan kesulitan sehubungan dengan pengelolaan tujuh cadangan biosfer di Indonesia. Terdapat sejumlah peraturan pemerintah yang berasal dari UU No.5/1990, yaitu:

#### *PP No.7/1999: Pengawetan jenis Tumbuhan dan satwa*

PP No. 7/1999 memberikan definisi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan habitat mereka, dan memberikan aturan untuk upaya pelestarian, menunjuk institusi konservasi, pengaturan pengiriman dan pengangkutan spesies yang dilindungi, dan kontrol dan monitoring yang menyeluruh. Hal ini juga membutuhkan control dan monitoring yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang berwenang dengan menggunakan aksi penegakan yang bersifat pencegahan dan pengendalian tindak kejahatan. Aksi pencegahan mencakup, tapi tidak terbatas pada, peningkatan kesadaran, pelatihan staf lembaga penegak hukum, dan menerbitkan pedoman identifikasi untuk spesies yang dilindungi. Aksi pengendalian atau supresi mencakup aksi penegakan hukum untuk membawa tersangka ke proses peradilan.

#### *PP No.8/1999: Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*

Peraturan Pemerintah No. 8/1999 memberikan aturan bagaimana melaksanakan undang-undang sehubungan dengan kegiatan komersil (penangkaran, perdagangan, peragaan komersial, dan budidaya tanaman obat) dan penggunaan untuk tujuan non-komersil (penelitian dan peragaan non-komersil). PP ini menyatakan sanksi kriminal, klasifikasi dan kuota. Selain mengandalkan hukuman dan sanksi yang disebutkan oleh UU No.5/1990, Peraturan Pemerintah No.8/1990 juga menyebutkan sanksi administratif. Dalam ayat 34 juga menyebutkan 11 spesies atau kelompok spesies yang hanya dapat digunakan dan dipertukarkan oleh Presiden Republik Indonesia.

*PP No.13/1994: Perburuan Satwa Buru*

Peraturan Pemerintah No. 13/1994 mengatur perburuan satwa liar yang diburu dan tidak dilindungi. Peraturan ini memberikan definisi perburuan satwa liar, area perburuan, musim, peralatan, izin, dan hak dan kewajiban pemburu.

*PP No.36/2010: Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam*

Peraturan ini menggantikan dan membatalkan PP No.18/1994 dan mengatur prosedur mendapatkan izin/lisensi untuk pengusaha pariwisata, zona pariwisata, rencana untuk pariwisata alam, aktivitas pariwisata yang diperbolehkan, dan tipe perusahaan pariwisata dibidang jasa dan infrastruktur.

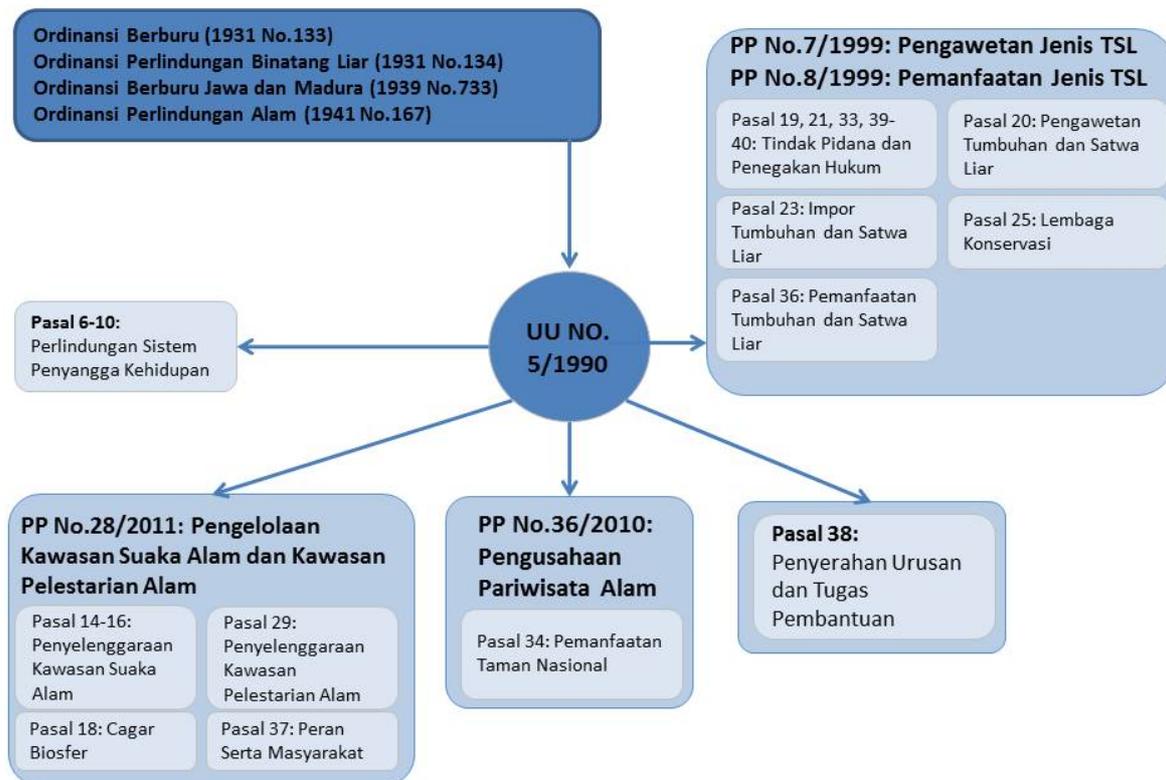
*PP No.28/2011: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*

Peraturan ini menggantikan dan membatalkan PP No.68/1998, dan mengatur pelestarian dan penggunaan optimal satwa liar dan ekosistem mereka di area suaka alam dan pelestarian alam. Hal ini mencakup pedoman mengenai kriteria tambahan dan prosedur untuk mengartikan dan menggambarkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, pengelolaan kawasan dan kolaborasi, zona penyangga, pembiayaan, dan pengembangan komunitas/partisipasi untuk mendukung pelestarian.

**Gambar 2. Area Pelestarian Alam di Indonesia**

Jenis	Daratan		Perairan		Gabungan Daratan dan Perairan	
	Unit	Area (Ha)	Unit	Area (Ha)	Unit	Area (Ha)
Cagar Alam	240	4,338,500	7	369,110	247	4,707,610
Suaka Margasatwa	70	5,051,737	7	338,118	77	5,389,855
Taman Nasional	43	12,237,251	7	4,043,541	50	16,280,793
Taman Wisata Alam	105	256,903	18	770,102	123	1,027,005
Taman Hutan Raya	21	343,454	-	-	21	343,454
Taman Buru	14	225,103	-	-	14	224,816
<b>Total Area Konservasi</b>	<b>493</b>	<b>22,452,950</b>	<b>39</b>	<b>5,520,872</b>	<b>532</b>	<b>27,973,822</b>

**Gambar 3. UU No. 5/1990 dan Peraturan Turunan**



UU No.16/1992: Karantina Tanaman, Ikan dan Binatang

Menanggapi meningkatnya perdagangan satwa liar di provinsi di Indonesia dan di tingkat internasional, dan karena resiko perpindahan spesies, hama dan penyakit yang dapat mengganggu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.16/1992 untuk menggantikan UU Karantina yang lama yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. UU ini membahas perayaraan karantina, mendefinisikan vector dan hama, menggambarkan tindakan dan proses penyidikan yang akan dilakukan, dan daftar hukuman dan denda. Karantina satwa lebih jauh diatur dengan Peraturan Pemerinta No.82/2000.

UU No.41/1999: Kehutanan

UU No.41/1999 dikeluarkan untuk menggantikan UU No.4/1967, mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. UU No.41/1999 kemudian direvisi oleh UU No.19/2004 untuk mengakomodasi pertambangan yang ada di area hutan. Prinsip dari UU No.41/1999 adalah untuk menciptakan pengelolaan hutan yang baik dengan mempertimbangkan dan menggabungkan pemanfaatan hutan dan konservasi hutan. UU ini juga bermaksud untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dalam proses ini, dan untuk memperjelas prosedur penyidikan, hukuman dan sanksi dan mendorong transparansi. Secara kritis, UU No.41/1999 juga memindahkan kewenangan operasional ke pemerintahan provinsi dan kabupaten, sehingga pemerintah pusat dapat menangani masalah strategis Indonesia yang berkaitan dengan kehutanan. Tinjauan judicial dari UU ini telah dilakukan beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Peninjauan ini fokus pada beberapa hal, termasuk proses pembentukan dan pengukuhan batasan hutan dan pengakuan hutan adat (hutan adat yang

dimiliki oleh masyarakat adat) sebagai bukan hutan negara. Beberapa ayat sehubungan dengan kejahatan kehutanan dan sanksi pidana telah dicabut dan diganti dengan UU No.18/2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdapat sejumlah peraturan yang berasal dari UU No.41/1999, termasuk:

*PP No. 45/2004: Perlindungan Hutan*

Peraturan Pemerintah No.45/2004 adalah peraturan pelaksanaan yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 28/1985. Mandat eksklusif diberikan kepada Kementerian Kehutanan untuk menjaga fungsi ekologis. Peran dan tanggung jawab polisi hutan dan PPNS kehutanan juga menekankan peningkatan penegakan hukum, dan komunitas serta sektor swasta dinilai mempunyai tanggung jawab dalam perlindungan hutan. Isi dari Peraturan Pemerintah No. 45/2004 termasuk pelaksanaan perlindungan hutan, perlindungan hutan dari kebakaran, dan hukuman dan sanksi untuk melanggar peraturan pemerintah.

*PP No. 6/2007: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*

Peraturan Pemerintah No.6/2007 mengatur penggunaan hutan dan menetapkan prosedur untuk mendapatkan izin dari pemerintah provinsi dan pusat untuk aktivitas penggunaan hutan. Hutan secara umum dikelompokkan menjadi tiga jenis: Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam, dan Hutan Produksi. Berbagai aktivitas yang berhubungan dengan hutan diatur dalam peraturan pemerintah ini, walaupun beberapa aktivitas membutuhkan peraturan lebih lanjut untuk dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Revisi pertama dari peraturan ini adalah PP No. 03/2008, yang memperkenalkan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

UU No. 18/2013: Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU ini dirancang untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan permasalahan hutan, termasuk tapi tidak terbatas pada pembalakan liar, pertambangan liar, perkebunan liar dan bentuk eksploitasi hutan tanpa izin lainnya. Beberapa klausul dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.41/1999 dicabut dengan adanya UU ini, dan UU ini memberikan klausul baru untuk kejahatan khusus yang berhubungan dengan area hutan yang dilindungi, produksi kayu, pertambangan, perkebunan, dan pencucian uang. UU ini memperkenalkan sejumlah ketentuan baru, yang mencakup perluasan yurisdiksi PPNS kehutanan di seluruh Indonesia, pengenalan protokol penyidikan baru sebagai tambahan yang ada di hukum pidana, dan pengenalan mekanisme blokir rekening bank terdakwa, penggunaan file elektronik sebagai barang bukti, masa hukuman penjara minimum dan maksimum yang baru, denda, dan sanksi administratif; dan pembentukan Badan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (P3H) pada tanggal 15 Agustus 2015. Berdasarkan cakupan, ini adalah UU paling komprehensif mengenai kehutanan. Berdasarkan definisi, badan ini tidak akan mengurus kejahatan yang berhubungan dengan satwa liar, walaupun ada kemungkinan tumpang tindih.

## **Undang-Undang Kelautan dan Perikanan**

UU No.27/2007, sehubungan dengan UU No.1/2014: Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Tujuan dari UU ini adalah untuk melindungi, rehabilitasi, dan memperkaya sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara yang berkesinambungan, dan juga untuk memberdayakan komunitas yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini memungkinkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP untuk menjadikan wilayah pesisir sebagai area pelestarian (didefinisikan sebagai area transisi antara ekosistem darat dan laut, membentang 12 mil dari daratan) dan pulau-pulau kecil (didefinisikan sebagai pulau dengan luas dibawah 2,000 km<sup>2</sup>). UU ini menerangkan kriteria area konservasi di dalam zona ini, tipe pelanggaran pidana yang ada dan resolusi konflik, dan sanksi administratif termasuk hukuman minimum dan maksimum dan denda yang dapat diberikan berdasarkan UU ini. UU No.27/2007 direvisi dengan UU No. 01/2014.

#### UU No. 31/2004 sehubungan dengan UU No.45/2009: Perikanan

UU ini dikeluarkan untuk menggantikan UU No.9/1985 mengenai Perikanan. UU ini fokus pada area laut dan air tawar, termasuk sungai, danau dan rawa, dan memberikan KKP kewenangan untuk menjadikan suatu spesies ikan menjadi spesies yang dilindungi, untuk mengontrol perdagangan ikan, dan untuk mengatur area konservasi di perairan/rawa. Hal ini juga mengatur aspek komersil perikanan Indonesia, termasuk deklarasi untuk melindungi ikan, dan jumlah kuota tangkapan, ukuran ikan, dan sejumlah kapal yang diizinkan. Bagian penting dari UU ini adalah penetapan protokol untuk investigasi, peradilan, hukuman dan denda, dan Peradilan Perikanan untuk tuntutan yang berhubungan dengan kejahatan perikanan. UU No.45/2009 merevisi dan menjelaskan beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya.

#### UU No.32/2014: Kelautan

UU ini dikeluarkan untuk menggantikan UU No. 6/1996 mengenai Perairan Indonesia. Jurisdiksi UU ini mencakup laut yang termasuk dalam kedaulatan Indonesia dalam landas kontinen. Dengan dikeluarkannya UU ini, KPP bertanggung jawab untuk kelautan, pesisir dan sumber daya perikanan. UU ini mencakup pengelolaan tata ruang kelautan, pengembangan dan tata kelola dan perlindungan lingkungan laut, termasuk hubungannya dengan pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. UU ini mempunyai satu klausa pidana dan beberapa sanksi administratif, tanpa menyebutkan siapa yang berhak melakukan proses penuntutan pidana. UU ini membutuhkan peraturan pemerintah turunan yang menjelaskan tata cara pelaksanaan, yang belum disetujui. UU ini menetapkan Badan Keamanan Kelautan sebagai badan koordinasi, tapi tidak diperuntukkan untuk kegiatan penyidikan. UU ini juga membutuhkan peraturan turunan mengenai perencanaan tata ruang kelautan, pengelompokan zona di pulau-pulau kecil, wilayah pesisir dan laut.

## **Undang-undang Lainnya**

#### UU No. 15/2002 dan UU No.8/2010: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada 5 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi UU Anti Pencucian Uang, ini adalah amandemen UU Pencucian Uang dan memberikan kekuatan lebih besar pada petugas anti korupsi. Salah satu dari amandemen yang penting dalam UU ini (UU NO.8/2010) adalah Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau PPATK, salah satu lembaga utama yang ikut serta dalam memberantas pencucian uang di

Indonesia, akan bisa diakses atau tersedia bagi institusi pemerintah yang lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, laporan PPATK hanya dikirim ke Kantor Jaksa Agung atau Kepolisian, sebagai pembuat keputusan apakah penyidikan lebih jauh akan dilakukan untuk melakukan penuntutan. Laporan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kasus yang ada berujung pada dakwaan. UU baru ini memungkinkan PPATK untuk memeriksa lebih banyak dokumen dan untuk membekukan rekening bank orang yang terlibat dalam transaksi yang mencurigakan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan alat penegakan hukum yang efektif, termasuk memungkinkan pelacakan aset dan pengembalian aset.<sup>11</sup> Amandemen dari UU ini, memperluas definisi “sumber kekayaan” dibawah yurisdiksi UU untuk mencakup bea cukai dan perikanan, sangat penting untuk memungkinkan UU ini digunakan sebagai pencegahan perdagangan dan satwa liar. Sebagai tambahan, revisi ini juga memungkinkan hukuman yang lebih besar untuk pelanggar, dan definisi “transaksi finansial” telah diperluas untuk mencakup penempatan, simpanan, pembayaran, penarikan, transfer, pemberian, donasi, deposito, dan/atau pertukaran sejumlah uang atau tindakan lain yang diasosiasikan dengan uang”. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan pelacakan aset, hal ini dapat membantu melacak dan mengurangi perdagangan satwa liar secara online, dan pergerakannya melintasi berbagai perbatasan. Hingga saat ini, meskipun dengan potensi nilai mereka yang penting, UU No.15 2002 dan UU No.8/2010 belum digunakan untuk mendukung peradilan perdagangan satwa liar.

#### UU No. 20/2001: Pemberantasan Korupsi

UU ini diterbitkan untuk merevisi beberapa pasal di UU No. 31/1999. UU ini menargetkan setiap individu yang memperkaya diri sendiri atau individu/perusahaan lain melalui penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan cara yang tersedia bagi mereka melalui kekuasaan yang mereka miliki, dan menyebabkan kerugian pendapatan negara. Walaupun jarang digunakan dalam kasus kejahatan terhadap satwa liar, hal ini sering berhubungan karena pemberian suap atau hadiah untuk memfasilitasi proses pengajuan izin atau pemberian ke pejabat di lembaga penegakan hukum (misal bea cukai, kepolisian, dan lain-lain) untuk tidak mengambil tindakan atau menyelidiki aktivitas kejahatan. Salah satu faktor yang kemungkinan akan membatasi kegunaan UU korupsi di kasus yang berhubungan dengan perdagangan satwa liar adalah penyidikan korupsi dianggap diluar kewenangan penyidik kehutanan, yang merupakan pihak penegakan hukum utama di lapangan. Sehubungan dengan peraturan menteri yang mencakup Peraturan Kementerian Kehutanan No. P63/2014, yang memberikan pedoman untuk menanggapi keluhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam Kementerian. Penggabungan Kementerian baru-baru ini dan relatif barunya peraturan ini berarti ada sedikit bukti untuk melihat efektivitasnya. Kementerian Kehutanan juga menerbitkan Instruksi No. 1/2012, yang fokus ke pengembangan Rencana Aksi Anti-Korupsi dengan hasil yang harus selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Namun hal ini tidak pernah dipublikasikan.

## **Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati dan Spesies**

Payung dokumen kebijakan bagi sektor lingkungan hidup adalah Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia tahun 2003-2020, yang dibuat oleh pemerintah untuk menggantikan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (BAPI) yang dibuat pada

---

<sup>11</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/06/new-law-empower-kpk-ppatk-graft-fight.html>.  
<http://en.hukumonline.com/pages/lt4caedf0301228/new-anti-money-laundering-law-passed-to-combatcorruption>

tahun 1993. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk mengembangkan strategi nasional, rencana dan program untuk pelestarian dan penggunaan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati. Dokumen IBSAP mengandung rencana strategis dan rencana aksi. Rencana strategis mengandung visi, misi, hal yang ingin dicapai, tujuan dan strategi pengelolaan pelestarian keanekaragaman hayati sementara rencana aksi berisi penjelasan lebih rinci mengenai rencana strategis, dan termasuk arah kebijakan, program, indikator performa, dan mitra potensial untuk implementasi program. Secara keseluruhan, dokumen ini merupakan referensi yang cukup komprehensif yang menggambarkan kondisi keanekaragaman hayati di tahun 2003, dan tujuan yang ingin dicapai tahun 2020. Sejak 2013, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan evaluasi pelaksanaan IBSAP, dengan tujuan untuk menyelesaikan revisi IBSAO untuk periode 2015-2020.

Sebagai tambahan dari rencana aksi umum, KLHK juga telah menerbitkan strategi pelestarian dan rencana aksi untuk beberapa spesies prioritas. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi dan pedoman bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pelestarian beberapa spesies. Lihat Gambar 4 dibawah. Setiap rencana aksi ini mengandung ketentuan dan indikator yang merujuk pada tindakan untuk mengurangi perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar di Indonesia. Bagaimanapun, terdapat sedikit analisa komprehensif yang saling melengkapi atau bertolakbelakang antara ketetapan sebelumnya dengan rencana aksi ini sehubungan dengan efektivitas mereka dalam mengurangi perdagangan satwa liar.

**Gambar 4. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati di Indonesia**

No	Spesies	Isu Utama
1	Spesies Nasional	Peraturan Kemenhut No. 57/2008 Strategi Konservasi Spesies Nasional Menetapkan daftar spesies prioritas dan tindakan umum yang akan diterapkan
2	Badak Sumatera	Peraturan Kemenhut No. 42/2007 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak 2007-2017
3	Harimau Sumatera	Peraturan Kemenhut No. 43/2007 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau 2007-2017
4	Gajah	Peraturan Kemenhut No. 44/2007 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah 2007-2017
5	Orangutan	Peraturan Kemenhut No. 53/2007 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan
6	Banteng	Peraturan Kemenhut No. 58/2011 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Banteng 2010-2020
7	Anoa	Peraturan Kemenhut No. 54/2013 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa
8	Babirusa	Peraturan Kemenhut No. 55/2013 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa
9	Tapir	Peraturan Kemenhut No. 57/2013 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Tapir
10	Elang Jawa	Peraturan Kemenhut No. 58/2013 Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa

## CITES, PERLINDUNGAN DAN PERDAGANGAN SPESIES

### Konvensi Internasional Mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang Hampir Punah (CITES)

Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang Hampir Punah (CITES) adalah perjanjian multilateral yang memberikan mekanisme internasional untuk mengatur perdagangan satwa liar. Terdapat 180 negara yang sekarang menjadi peserta CITES. Walaupun CITES bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang ikut serta dalam konvensi ini, misal. Negara harus melaksanakan konvensi, hal ini tidak mengambil alih tempat undang-undang nasional. Konvensi ini mengharuskan negara yang ikut serta untuk menerapkan peraturan domestik CITES untuk memastikan bahwa CITES diimplementasikan pada tingkat nasional. Indonesia menjadi peserta CITES pada tahun 1978, dan mulai memberlakukan UU No. 5/1990 dan peraturan turunan sehubungan dengan UU ini sebagai peraturan nasional utama bagi pelaksanaan CITES. Setiap pihak yang ada dalam konvensi ini harus mendelegasikan satu atau lebih dari satu badan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem perizinan dan satu lagi badan ilmiah untuk memberikan nasehat mengenai dampak perdagangan terhadap status spesies. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Badan Pengelola CITES, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Badan Ilmiah CITES.

CITES mengatur dan mengawasi perdagangan dengan menggunakan “daftar negatif” seperti perdagangan semua spesies yang diperbolehkan dan tidak diatur kecuali spesies tersebut muncul di lampiran. Spesies yang dilindungi terdaftar dalam satu dari tiga lampiran:

- **Appendix I**, Sekitar 1,200 spesies, dan merupakan spesies yang terancam punah atau dapat menjadi terancam punah karena diperdagangkan. Perdagangan komersial spesies liar yang ditangkap dari spesies dalam daftar ini adalah ilegal (hanya diperbolehkan dalam keadaan khusus untuk tujuan non-komersial). Perdagangan hewan penangkaran atau tanaman yang dikembangbiakan secara buatan yang ada dalam daftar Appendix I dianggap spesies yang termasuk dalam Appendix II, dengan adanya persyaratan (lihat dibawah). Perdagangan dari spesies ini membutuhkan izin ekspor dan impor, yang diterbitkan oleh badan pengelolaan di masing-masing negara. Badan pengelolaan dari negara eksportir diharapkan untuk memeriksa bahwa izin impor telah ada dan negara importir diharapkan dapat menjaga spesies dengan baik. Sebagai tambahan, badan ilmiah negara eksportir harus membuat temuan yang menyatakan tidak ada kerugian, yang menjamin bahwa ekspor spesies tidak akan berdampak buruk pada populasi satwa liar.
- **Appendix II**, Sekitar 21,000 spesies, adalah spesies yang tidak terancam punah, namun dapat terancam punah jika perdagangan spesies tersebut tidak diatur dengan ketat untuk menghindari penggunaan yang bertentangan dengan kelangsungan hidup spesies di alam liar. Sebagai tambahan, Appendix II dapat mencakup spesies yang secara fisik mirip dengan spesies yang sudah terdaftar dalam lampiran ini. Perdagangan internasional spesies Appendix II dapat disetujui dengan memberikan izin ekspor atau sertifikat re-ekspor oleh badan pengelolaan negara eksportir. Tidak ada izin impor yang dibutuhkan walaupun beberapa pihak menysaratkan hal ini sebagai bentuk peraturan domestik yang lebih ketat. Sebelum izin ekspor diberikan,

perusahaan ekspor harus memastikan bahwa ekspor tidak akan berdampak buruk pada populasi spesies di alam liar.

- **Appendix III**, 170 spesies, adalah spesies yang terdaftar setelah satu negara meminta CITES untuk membantu mengontrol perdagangan spesies tersebut. Spesies tidak selalu terancam kepunahan global. Di semua negara anggota, perdagangan spesies ini hanya diperbolehkan dengan izin ekspor dan sertifikat asal dari negara anggota yang telah mendaftarkan spesies.

## Undang-Undang tentang CITES di Indonesia

Walaupun Indonesia menyetujui CITES pada tahun 1978, tapi undang-undang pelaksanaan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1990. UU No. 5/1990, mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah undang-undang utama dalam pelaksanaan CITES. Namun, dibutuhkan waktu hingga tahun 1999 untuk menerbitkan peraturan turunan yang diperlukan. Peraturan turunan yang dimaksud mencakup Peraturan Pemerintah No. 7/1999, mengenai Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No. 8/1999, mengenai Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan Turunan lebih jauh lagi mencakup Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/2003, mengenai Arahan Administratif Panen atau Penangkapan dan Distribusi jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.19/2005, mengenai Pengelolaan Penangkaran Tanaman dan Satwa Liar. Dalam UU No.5/1990, pelanggaran ketentuan spesies dilindungi dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimum lima tahun dan/atau denda hingga 100 juta Rupiah.

UU No. 5/1990 menyediakan kerangka, dan peraturan turunannya, dan telah dianalisa oleh CITES agar sesuai untuk implementasi nasional dari konvensi tersebut. Namun, terdapat celah yang cukup besar dalam undang-undang ini sehubungan dengan spesies yang bukan berasal dari Indonesia, dan kesulitan memperbaharui daftar spesies yang dilindungi untuk mencerminkan tambahan terbaru dalam appendix CITES. UU ini juga tidak menyediakan peraturan untuk spesies yang tidak dilindungi. Walaupun Peraturan Pemerintah No. 7/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 8/1999 memberikan perlindungan hukum untuk spesies yang tidak dilindungi menggunakan undang-undang lain, seperti Hukum Pidana Umum, Adat dan Cukai dan Undang-undang Karantina, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut sejauh ini tidak efektif.

Peraturan-peraturan tersebut menetapkan sistem perizinan untuk spesies yang terdaftar di CITES, yang mencakup pengelolaan panen, pengaturan kuota penangkapan, pengendalian pengangkutan dan kontrol sistem pengelolaan penangkapan. Terdapat pedoman untuk membuat temuan yang tidak merugikan CITES untuk mengimplementasikan Pasal III, IV dan V dari konvensi ini. Kuota penangkapan, yang dimulai pada awal tahun 1990 pada awalnya adalah “pedoman panen”. Pada lima tahun pertama, ekspor seringkali melebihi kuota. Namun sekarang, protokol yang ada untuk menetapkan kuota tahunan untuk spesies yang terdaftar di Appendix II yang dipanen dan diekspor juga sesuai dengan yang digunakan untuk menetapkan kuota tahunan untuk pengelolaan perdagangan spesies stawa liar yang tidak terdaftar di CITES dan diperkirakan telah mengalami perbaikan. Dalam menghadapi tidak adanya data populasi satwa liar dalam skala nasional, sistem kuota ini dikembangkan sebagai respon “pengelolaan adaptif” yang awalnya merupakan mekanisme kontrol panen. Sistem kuota di Indonesia ditetapkan dengan prinsip yang luas dimana pada tingkat pencegahan kuota lebih baik nol yang dapat mendorong penyelundupan dan perdagangan

ilegal untuk memasok permintaan yang ada. Beberapa lokakarya di Indonesia fokus pada metodologi temuan yang menyatakan tidak ada kerugian di tahun 2002, Badan Ilmiah CITES Indonesia sekarang menggunakan Pedoman IUCN (Rosser dan Haywood, 2002) untuk membantu pembuatan temuan yang menyatakan tidak ada kerugian untuk ekspor Appendix –II. Kuota yang ditetapkan berdasarkan analisa temuan tidak merugikan adalah sebagai berikut:

- Setiap tahun pada bulan Juli – Agustus, BKSDA di setiap provinsi memberikan informasi atau data area panen, total panen tahun-tahun sebelumnya, dan rekomendasi hasil panen pada tahun mendatang kepada Badan Ilmiah. Jika ada, BKSDA juga memberikan data kualitatif mengenai hasil survey banyaknya populasi di alam liar;
- Setiap tahun pada bulan September, Badan Ilmiah CITES mengadakan seminar (proses konsultasi) dengan semua pemangku kepentingan, yang mencakup badan pemerintah (penelitian, manajemen, perdagangan, industri), universitas, LSM (lokal, nasional, internasional), dan asosiasi dagang;
- Informasi tambahan kemudian dimasukkan dalam proses pertimbangan dari proses seminar, terutama dari individu/organisasi dalam bidang penelitian, dan membantu membuat penyesuaian yang tepat pada jumlah kuota yang diajukan;
- Badan Ilmiah CITES kemudian dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan organisasi lain mengenai informasi terkait, dan masih terbuka untuk permintaan pengajuan lebih lanjut;
- Dari proses diatas, LIPI sebagai Badan Ilmiah kemudian memberikan rekomendasi kepada Badan Pengelolaan, yang secara resmi menetapkan jumlah kuota tahunan melalui keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Pada keputusan akhir, untuk mengakomodasi perdagangan domestik, kuota ekspor dialokasikan 90% dari kuota panen. Keputusan ini menginformasikan jumlah panen tahunan yang diperbolehkan dari setiap spesies pada tingkat nasional, yang dialokasikan ke berbagai provinsi. Idealnya, kuota untuk setiap provinsi harus ditetapkan sesuai dengan “sistem produksi” potensial di setiap provinsi, tapi hal ini adalah proses yang masih berjalan dan membutuhkan tinjauan yang lebih lanjut, khususnya peran perkebunan dan sistem penangkaran dalam memasok perdagangan. Kuota panen untuk setiap spesies berdasarkan perkiraan data yang ada, termasuk: informasi mengenai biologi dan persebaran spesies, penggunaan lahan umum dan potensi ancaman di area tertentu.
- Pada tingkat ini, Direktur Jenderal masih dapat menerima informasi tambahan yang dapat berujung pada penurunan kuota (biasanya lebih sedikit dari yang direkomendasikan oleh Badan Ilmiah) sebelum penandatanganan daftar tahunan.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/2003 menetapkan prosedur inspeksi dan kontrol dilakukan oleh badan yang berwenang disetiap tingkatan (BKSDA dan Kantor Pusat PHKA) dalam hal panen, calo, pedagang, orang yang melakukan pemindahan dan eskportir dan importer, dan harus sesuai dengan kuota yang dialokasikan. Produksi berbasis tangkapan spesies mendapatkan arahan dan diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 19/2005. Keputusan ini memberikan pedoman dan pengaturan mengenai tangkapan penangkaran sesuai dengan Pasal VII CITES dan Resolusi Konferensi 10.16.

Walaupun kerangka peraturan ini sangat baik, terdapat beberapa masalah signifikan dengan undang-undang, yang paling penting adalah daftar spesies dilindungi mana yang akan dijadikan Annex Peraturan Pemerintah No. 7/1999.

## Peraturan Pemerintah No. 7/1999: Daftar Spesies yang Dilindungi

Inti dari kerangka peraturan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/1999, yang memberikan daftar spesies yang dilindungi di Indonesia. Daftar ini mencakup 294 spesies atau kelompok spesies:<sup>12</sup>

- 70 mamalia, termasuk *cetacea*.
- 93 burung
- 31 reptil: biawak, gharial dan buaya, beberapa jenis phiton, beberapa kura-kura air tawar dan kura-kura darat, semua kura-kura laut, kadal sailfin
- 20 serangga: semua kupu-kupu
- 7 ikan: termasuk *sawfish (Pritis spp.)*
- 1 karang: karang hitam
- 14 moluska: kerang, nautilus, giant triton, coconut crab.
- 58 tanaman: termasuk anggrek, rafflesia, tanaman pitcher dan dipterocarps.

Penangkapan dari alam liar dan penjualan spesies diatas adalah pelanggaran UU No. 5/1990, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara dan denda hingga 100 juta.

Lebih jauh, PP No. 8/1999, Pasal 34, terdapat daftar 11 spesies atau kelompok spesies yang hanya bisa digunakan dan dipertukarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Spesies tersebut adalah:

- Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
- Babirusa (*Babyrousa babyrussa*);
- Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
- Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
- Komodo (*Varanus komodoensis*);
- Burung Cendrawasih (Semua spesies dari kelompok Paradiseidae);
- Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*);
- Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
- Siamang Mentawai (*Presbytis potenziani*);
- Orangutan (*Pongo pygmaeus*); and
- Moloch Jawa (*Hylobates moloch*).

Namun terdapat sejumlah masalah penting dengan daftar spesies yang dilindungi, dan ketentuan dalam PP No. 8/1999. Hal ini didiskusikan dalam bagian “kesenjangan dan tantangan penting” di akhir laporan ini.

## **Implementasi CITES di Indonesia**

Implementasi CITES, termasuk penegakan semua undang-undang terkait, membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara badan-badan terkait dan Kementerian pada tingkat nasional. Hal ini juga membutuhkan kerjasama yang erat melalui kerjasama bilateral, regional dan internasional termasuk organisasi internasional dan non-pemerintah. Pada tingkat nasional, Badan Pengelolaan CITES, KLHK, harus mengkoordinasikan implementasi CITES dan

---

<sup>12</sup> Daftar lengkap dapat dilihat pada <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl359/node/250>

penegakannya dengan sejumlah lembaga, termasuk bea cukai, karantina, kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Beberapa modul pelatihan, pedoman mengenai identifikasi spesies dan CITES telah diproduksi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk penegak hukum dari semua lembaga terkait telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan CITES dan kolaborasi bilateral dan organisasi non-pemerintah digunakan untuk melacak perdagangan ilegal satwa liar, melakukan tinjauan populasi dan hal lainnya yang terkait CITES. Kerjasama dengan ICPO-Interpol juga dapat membantu penegakan hukum pada tingkat internasional dan meningkatkan kapasitas jaringan CITES dan badan penegakan hukum di Indonesia.

Pada tingkat regional dan internasional, Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN – Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). Jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai informasi intelijen dan untuk kerjasama terkait CITES dengan negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kerjasama bilateral dengan beberapa negara seperti Vietnam, yang sering menjadi tujuan utama produk satwa liar ilegal dari Indonesia. Dalam MoU bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia juga memprioritaskan aksi pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar. Dan Indonesia juga merupakan penandatangan Deklarasi London mengenai Perdagangan Ilegal Satwa Liar pada bulan Februari 2014.

## **Pengaturan Pengelolaan CITES untuk spesies laut**

Saat ini KLHK adalah satu-satunya Badan Pengelolaan CITES di Indonesia, dan LIPI adalah Badan Ilmiah CITES. Dalam sistem ini, peraturan daftar spesies laut CITES bermasalah, karena hal ini masuk dalam kewenangan KKP. Pasal IX CITES menyatakan bahwa setiap pihak dapat mendelegasikan tujuan dari konvensi: (a) satu atau lebih Badan Pengelolaan yang kompeten untuk memberikan izin atau sertifikat atas nama pihak tersebut; dan (b) satu atau lebih dari Badan Ilmiah. Hal ini memungkinkan Badan Pengelolaan CITES, KLHK, untuk berbagi peran dengan KKP sehubungan dengan spesies laut di Indonesia. Namun hal ini membutuhkan modifikasi dari peraturan CITES yang ada sekarang.

Undang-undang nasional implementasi CITES harus dapat memenuhi setidaknya empat kriteria: (1) menunjuk lembaga pengelolaan dan ilmiah; (2) mengambil tindakan yang sesuai untuk menegakan ketentuan dari konvensi yang ada dan melarang perdagangan spesies yang melanggar konvensi; (3) menghukum perdagangan, kepemilikan, dari spesies yang ada di daftar CITES. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa Undang-undang perikanan (UU No. 31/2004 dan seperti yang diamandemen dalam UU No. 45/2009) tidak dapat melaksanakan kriteria (2) dan memerlukan reformasi agar sesuai dengan pelaksanaan CITES di Indonesia.

Pengembangan implementasi peraturan CITES di Indonesia oleh Lembaga Pengelolaan CITES tambahan harus memenuhi kriteria yang sama. Terdapat dua pilihan untuk KKP:

Opsi 1: Terus menggunakan UU No. 5/1990 dan peraturan turunannya sebagai dasar bagi implementasi CITES dan pemilihan spesies yang dilindungi. Dalam skenario ini, UU Perikanan (UU No. 31/2004 dan No. 45/2009) digunakan sebagai undang-undang pelengkap. KLHK bisa menetapkan tambahan peraturan pelaksanaan yang khusus untuk spesies laut jika diperlukan.

Opsi 2: Undang-undang Perikanan (UU No. 31/2004 dan No. 45/2009) digunakan sebagai undang-undang nasional yang berbeda bagi implementasi CITES untuk spesies laut. Namun, sejak UU Perikanan tidak memenuhi persyaratan CITES, UU No. 45/2009 harus di

amandemen untuk memenuhi persyaratan CITES sebelum diaplikasikan sebagai UU spesies kelautan.

Rekomendasi kerangka institusional yang harus dibangun untuk pemindahan kewenangan dari KLHK ke KKP mengenai spesies laut adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga pengelolaan CITES di Indonesia dapat dijalankan oleh dua lembaga dengan tambahan kewenangan untuk spesies laut berada dibawah KLHK;
- 2) Dalam kasus dimana dua Lembaga Pengelolaan beroperasi, harus ada satu koordinator atau lembaga untuk berkomunikasi dengan Sekretariat CITES dan Pihak lain. Dalam hal ini, KLHK dapat menjadi lembaga untuk mewakili Indonesia.
- 3) Untuk saat ini KLHK menggunakan UU No. 5/90 dan peraturan pelaksanaan untuk CITES sebagai undang-undang utama implementasi CITES untuk spesies laut.
- 4) Mempersiapkan struktur organisasi, khususnya mekanisme kontrol, termasuk penerbitan izin, inspeksi termasuk memantau penangkapan dan transportasi:
  - a. Struktur organisasi pada tingkat nasional terdiri dari lembaga dibawah Kementerian untuk melakukan fungsi Lembaga Pengelolaan untuk spesies laut pada tingkat nasional;
  - b. Struktur organisasi pada tingkat lokal yang melakukan fungsi inspeksi, monitoring panen, penangkaran dan pertumbuhan dan sistem pengelolaan database untuk keperluan kontrol dari Badan Pengelolaan;
- 5) Struktur penegakan hukum yang dirancang untuk melakukan fungsi lembaga dalam melakukan penyidikan kejahatan dan perlindungan spesies laut.
- 6) Struktur organisasi untuk menetapkan Temuan Yang Menyatakan Tidak Ada Kerugian (NDF) yang dirancang khusus untuk spesies laut, termasuk penetapan kuota, monitor populasi, pengembangan NPOA dan pengembangan kebijakan;
- 7) Menentukan periode transisi untuk memindahkan kewenangan dari KLHK ke KKP;
- 8) Meninjau Undang-undang Perikanan dan melakukan revisi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan CITES dan implementasi konvensi.

Opsi manapun yang diambil, begitu penunjukan KLHK sebagai Lembaga Pengelolaan CITES berlaku, penguatan institusi yang efektif dan proses pembangunan kapasitas harus dilakukan untuk permasalahan yang berhubungan dengan penerbitan izin, pengendalian panen, pengangkutan dan penegakan hukum.

# KERANGKA INSTITUSI UNTUK PENEGAKAN DAN IMPLEMENTASI

## Payung Struktur Institusi

Terdapat sejumlah institusi pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional yang terlibat secara langsung atau tidak dalam tata kelola hutan dan kejahatan terhadap satwa liar. Institusi-institusi tersebut adalah:

- Penegak Hukum: Kepolisian Negara Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung (peradilan).
- Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas kehutanan Provinsi/Kabupaten, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Badan Lingkungan Hidup Regional
- Institusi Perdagangan dan Industri: Kementerian Industri dan Perdagangan, dan Bea Cukai.
- Pertanian: Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Institusi Transportasi: Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan
- Institusi Budget dan Kebijakan: Kementerian Keuangan, gubernur, dan kepala desa
- Institusi Penelitian: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi
- Badan Koordinasi: Koordinasi Kementerian Politik dan Keamanan, dan Kementerian Perencanaan Nasional.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat empat lembaga pemerintah yang secara langsung menangani penegakan hukum; penyidik kepolisian, jaksa penuntut, penjara dan pengadilan, walaupun fungsi dari pengadilan adalah untuk mengadili kasus yang disampaikan penegak hukum (kasus pidana) atau lembaga pemerintah lain dan publik (kasus perdata). Kepolisian adalah satu-satunya institusi yang beroperasi pada tingkat kecamatan sementara ketiga lembaga lainnya beroperasi pada tingkat kabupaten/kota, dimana pengadilan negeri berada, provinsi (pengadilan tinggi), dan nasional (mahkamah agung). Biasanya, setiap institusi pada tingkat yang lebih rendah harus melapor ke atau berkoordinasi dengan rekan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Pengadilan ini diharapkan untuk melakukan pengambilan keputusan yang independen pada setiap perkara di tingkat mereka.

Pengadilan Negeri/Penuntut Umum (tingkat pertama) biasanya berada di tingkat kota dan kabupaten dimana Pengadilan Provinsi/Penuntut Umum (tingkat kedua) berada di Ibukota Provinsi. Salah satu pihak yang disebut diatas dapat melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi jika mereka merasa tidak puas dengan keputusan di pengadilan negeri. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi, berlokasi di Jakarta. Kantor Pusat Kejaksaan Agung juga berlokasi di Jakarta.

## Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prosedur standar untuk penanganan kasus pidana pada tingkat lembaga pelaksana diatur dalam UU No. 8/1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum Pidana secara umum diterapkan untuk semua tipe kejahatan kecuali disebutkan secara khusus dalam UU lain, dan jika hal ini terjadi maka prioritas diberikan kepada UU lain sesuai dengan prinsip *les specialis derogate lex generali* (misal Hukum Konservasi (kejahatan khusus) lebih

diutamakan dibandingkan dengan KUHP (kejahatan umum)). Oleh karena itu, dalam prakteknya, peradilan kejahatan terhadap satwa liar atau pelanggaran konservasi harus menggunakan UU Konservasi atau Kehutanan dibandingkan Hukum Pidana, walaupun beberapa kejahatan dirinci dalam hukum pidana dapat juga digunakan sebagai tuntutan sekunder atau tersier untuk mendukung tuntutan utama. Demikian pula, semua prosedur untuk penyidikan dan tuntutan kejahatan harus menggunakan Hukum Acara Pidana kecuali disebutkan dalam hukum khusus yang lain.

Penanganan masalah hukum dalam pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga termasuk dalam undang-undang administratif dan undang-undang sipil. Contoh dari tuntutan hukum sipil termasuk ketika pemerintah dituntut oleh publik karena konflik kepemilikan tanah, atau pemerintah dituntut perusahaan karena perilaku tidak pantas. Sebagai contoh praktis, pemerintah pernah dituntut menggunakan hukum administratif karena memberikan hak perkebunan di Cagar Alam Rawa Singkil, Aceh, yang menjadi habitat orang-utan.

## **Penyidikan Pidana terhadap satwa liar**

KUHAP menyatakan bahwa penyidikan kejahatan harus dilakukan oleh penyidik polisi atau sipil (Penyidik Pegawai Negeri Sipil - PPNS) yang telah diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan investigasi kejahatan dan mengajukan kasus pidana sesuai dengan UU yang berlaku.

KLHK mempunyai beberapa staf yang telah dilatih sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menyelidiki kasus khusus dibawah kewenangan Kementerian mereka. Kebanyakan dari polisi hutan dan penyidik KLHK ditempatkan di taman nasional atau Badan Konservasi Sumberdaya Alam provinsi (BKSDA). Hanya beberapa dari mereka yang ditugaskan di kantor lokal untuk membantu jika diperlukan, atau pada saat ada kejahatan yang terjadi di beberapa provinsi. Terdapat kemungkinan bahwa pengaturan ini dapat berubah menjadi lebih jelas ketika struktur KLHK yang baru disatukan dengan Kementerian lain (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan).

Berbeda dengan penyidik polisi, PPNS dari KLHK hanya dapat menyelidiki kasus kejahatan spesifik sesuai dengan undang-undang yang mengatur yurisdiksi mereka, dalam hal ini kasus kejahatan kehutanan dan satwa liar, dan PPNS dari KKP hanya dapat menyelidiki kejahatan perikanan. Selain itu, penyidik sipil yang mempunyai izin nasional dapat melakukan penyidikan diseluruh Indonesia. Jika tidak, mereka hanya dapat melakukan penyidikan berdasarkan area kerja tertentu.<sup>13</sup> Penyidik yang sudah terlatih tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran pidana. Mereka harus mempunyai Surat Keputusan dari Kementerian Hukum sebagai "izin" untuk melakukan penyidikan. Bahkan banyak penyidik yang terlatih tidak mempunyai "izin", atau mereka punya lisensi yang sudah kadaluwarsa atau mereka beroperasi di luar wilayah yurisdiksi mereka. Akibatnya, dan karena polisi diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan seluruh jenis kejahatan, kebanyakan kasus ditangani oleh penyidik polisi. Petugas Bea Cukai dan Karantina dapat juga mendukung penyidikan kejahatan terhadap satwa liar untuk memantau

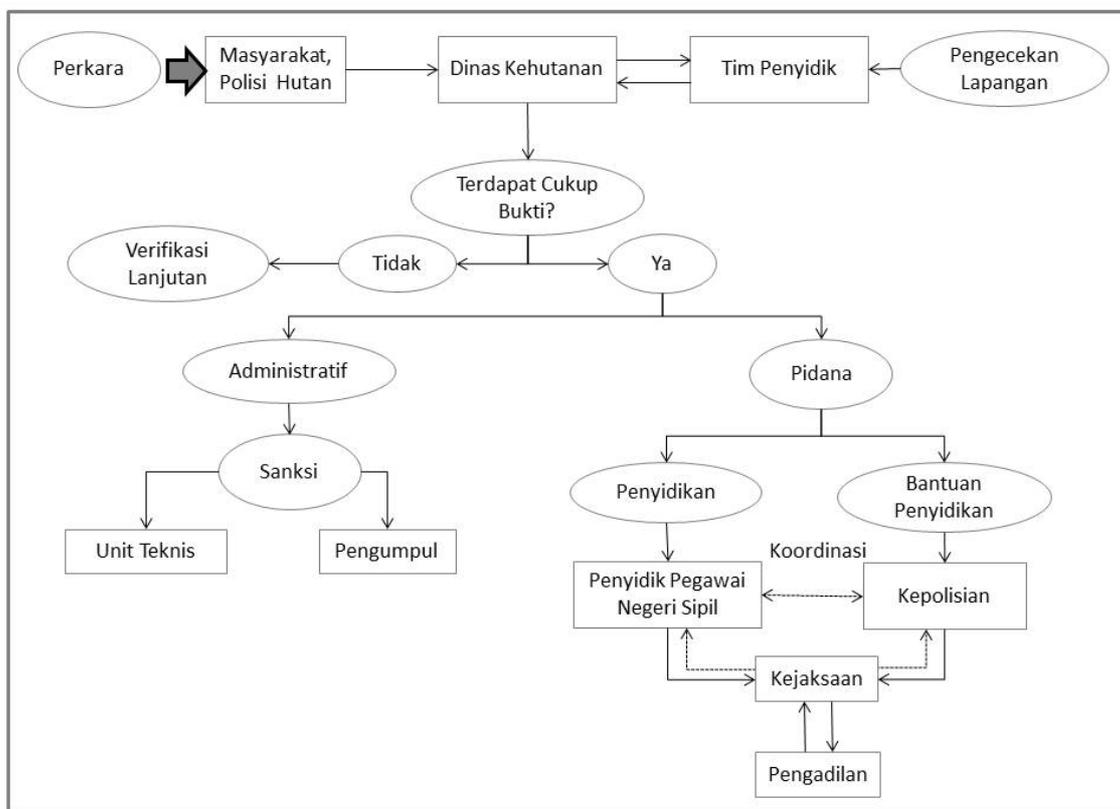
---

<sup>13</sup> Pegawai Negeri Sipil di bidang kelautan memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam UU No.27/2007.

potensi ekspor/impор/pemindahan satwa liar dari satu tempat di dalam Indonesia ke negara lain.

Di masa datang, direkomendasikan untuk semua penyidik kejatan satwa liar harus dilakukan oleh penyidik sipil karena mereka memiliki pengetahuan teknis yang lebih spesifik dibandingkan kepolisian nasional, terutama ketika melakukan pengeledahan, pengumpulan barang bukti, atau membuat kasus untuk kejahatan yang berhubungan dengan konservasi. Penyidik sipil hanya membutuhkan pelatihan biasa dalam melakukan pengeledahan, teknik penyidikan dan pengelolaan barang bukti. Proses penyidikan dan pembuatan kasus untuk tuntutan dapat dilihat dibawah ini.

**Gambar 5. Proses Penegakan Hukum untuk kejahatan dan pelanggaran administratif (Suryadi, et.al., 2007)**



**Gambar 6. Jenis Kejahatan dan Hukuman Maksimum berdasarkan Undang-Undang Konservasi, Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup**

Jenis Pidana	UU	Sengaja Penjara (Tahun)	Denda (Rp juta)	Lalai Penjara (Tahun)	Denda (Rp juta)
Mengurangi, mengubah, menghilangkan fungsi kawasan dilindungi (Pasal.19, 33)	UU 5/1990	10	200	1	50
Mengambil, menebang, merusak spesies dilindungi (Pasal.21)	UU 5/1990	5	100	1	50
Mengangkut spesies dilindungi (Pasal.21)	UU 5/1990	5	100	1	50
Memperdagangkan spesies dilindungi (Pasal.21)	UU 5/1990	5	100	1	50
Menyimpan/memiliki spesies dilindungi tanpa izin (Pasal.21)	UU 5/1990	5	100	1	50
Kebakaran Hutan	UU 32/2009	3-10	3,000-	5	1,000

				10,000		
Perburuan atau perdagangan spesies dilindungi (Pasal.100)*	UU 31/2004			250		
Tidak memiliki perdagangan ikan (Pasal.26)	UU 31/2004	8		1,500		
Pengiriman, pengedaran atau penyimpanan ikan yang merugikan masyarakat (Pasal. 88)	UU 31/2004	6		1,500		
Mengambil/merusak terumbu karang, menggunakan peledak dan racun	UU 27/2007	2-10		2,000-10,000	5	1,000
Melanggar kewajiban rehabilitasi atau reklamasi	UU 27/2007	0.5		300		
Perdagangan online objek yang dilindungi**	UU 11/2008	6		1,000		

\* Catatan: Hukuman untuk perburuan atau perdagangan spesies dilindungi berbeda dalam Undang-undang Pelaksanaan Konservasi No. 5/1990 dan Undang-Undang Pelaksanaan Perikanan No. 31/2004. Undang-undang Perikanan mempunyai denda yang lebih tinggi tapi tidak ada hukuman penjara. Untuk spesies laut pada PP.7/1999 ketentuan dalam UU Pelaksanaan No.5/1990 berlaku, yang mencakup kura-kura laut, *cetaceans*, koral hitam, dll. Untuk spesies laut yang dilindungi secara terpisah oleh KLHK (misal. manta), ketentuan yang berlaku dalam UU No.31/2004. Untuk memberikan hukuman penjara bagi pedagang ilegal manta KLHK menggunakan Pasal 26 dalam UU pelaksanaan No. 31/2004, yang berhubungan dengan perdagangan tanpa izin yang sesuai, dimana hukuman bisa mencapai 8 tahun di penjara. Pasal ini tidak mencakup perikanan jumlah kecil, sehingga nelayan tradisional tidak akan ditangkap berdasarkan undang-undang ini.

\*\* Catatan: Perlu dokumentasi oleh penyidik sipil khusus, bukan penyidik Kehutanan atau Perikanan.

## Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebelum Januari 2015, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang berada di dalam Kementerian Kehutanan adalah institusi yang bertanggung jawab untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan area yang dilindungi. Di bawah arahan PHKA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA, biasanya berada di tingkat provinsi) dan Kantor Taman Nasional adalah perwakilan (unit pelaksana) dari pemerintah pusat dengan tanggung jawab untuk mengelola keanekaragaman hayati dan area cagar alam. Pada masa jabatan Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung menjadi satu Kementerian (KLHK). Oleh karena itu, struktur dan tanggung jawab pengelolaan pelestarian keanekaragaman hayati akan berubah. PHKA akan diubah menjadi Direktorat Jenderal Ekosistem dan Konservasi Sumber Daya Alam. Direktorat Penegakan Hukum Kehutanan di dalam PHKA akan dipromosikan menjadi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kombinasi kapasitas penegakan hukum antara kementerian tersebut menjanjikan langkah positif dalam upaya menurunkan kejahatan terhadap satwa liar dan kejahatan kehutanan, walaupun masih sedikitnya staf yang menangani penegakan hukum setelah kedua Kementerian menjadi satu.

Saat ini, penegakan hukum kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia sangat bergantung pada polisi hutan khusus (polisi hutan atau Polhut) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ditetapkan berdasarkan mandat UU pelaksana No. 41/1999 mengenai Kehutanan, dan diberikan kewenangan khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan dan satwa liar. Operasi polisi hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 75/2014. Keputusan Menteri No. 56/2014 juga memungkinkan Masyarakat Mitra Polhut atau MMP, dimana komunitas dapat direkrut dan dilatih untuk membantu polisi hutan untuk melindungi hutan dan satwa liar, ikut dalam patroli, menjalani aktivitas untuk meningkatkan kesadaran, dan memberikan informasi mengenai aktivitas ilegal.

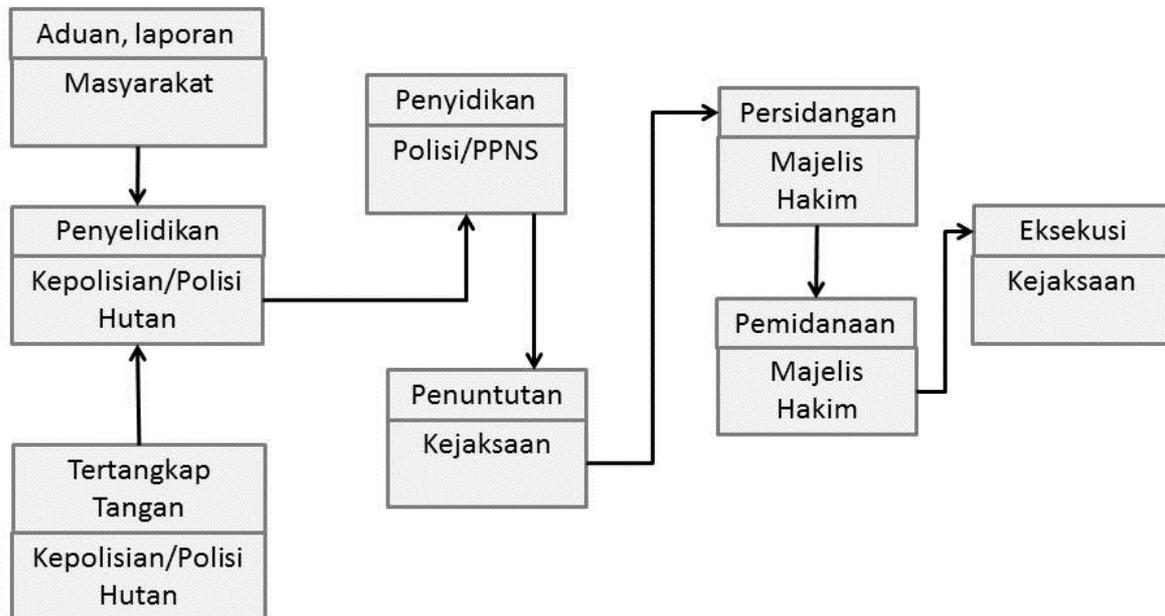
Setiap unit pengelolaan (taman nasional atau BKSDA) mempekerjakan polisi hutan dan PPNS untuk menjalankan patroli untuk kepentingan perlindungan dan penegakan hukum. Terdapat total 7,908 polisi hutan di seluruh Indonesia, termasuk 833 polisi hutan yang telah dilatih khusus dan membentuk satu dari 11 Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) untuk membantu taman nasional atau BKSDA untuk operasi penegakan hukum khusus. Hanya 2,999 polisi hutan yang berada dalam kewenangan area yang dilindungi. Selain itu, terdapat 1,841 penyidik sipil (PPNS) yang ditempatkan di taman nasional dan kantor BKSDA.

Secara keseluruhan, tingkat sumber daya seperti ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan >100 juta hektar area hutan di Indonesia, jumlah pulau yang banyak dan ratusan area konservasi. Lebih jauh lagi, walaupun polisi hutan telah diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar, kewenangan mereka terbatas, dan mereka tidak punya kekuatan yang sama dengan kepolisian nasional, seperti kemampuan untuk menahan tersangka. Maka penting untuk meningkatkan kapasitas dan kewenangan polisi hutan dan penyidik sipil untuk meningkatkan upaya memberantas meningkatnya jumlah kejahatan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati yang semakin canggih (termasuk kejahatan terhadap satwa liar, perambahan habitat hutan dan *bio-piracy*).

Keterbatasan penting kedua adalah sistem yang ada dimana PPNS tidak dapat langsung mengirimkan catatan kasus ke jaksa. Sebaliknya, mereka harus mengirimkan dokumen

melalui penyidik polisi. Gambar 7 di bawah menunjukkan proses standar penanganan kejahatan kehutanan/satwa liar.

**Gambar 7. Proses penanganan perkara kehutanan/satwa liar**



## Kementerian Kelautan dan Perikanan

Diantara lima Direktorat Jenderal dalam KKP, terdapat dua Direktorat Jenderal yang berhubungan dengan konservasi spesies dan wilayah; Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil; dan Direktorat Jenderal Supervisi/Monitoring Kelautan dan Sumber Daya Ikan, yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang Perikanan untuk memberikan definisi dan memutuskan spesies yang dilindungi, kuota, dan membuka area untuk konservasi untuk sumber daya perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60/2007 mengenai Konservasi Sumber Daya Perikanan. Sama dengan KLHK, KKP mempunyai penyidik sipil (PPNS) yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran perikanan (termasuk spesies yang dilindungi sesuai dengan Undang-undang Perikanan, seperti manta). Namun, KLHK tidak mempunyai hal yang setara dengan polisi hutan dan SPORC (misal unit aksi cepat). Ini adalah kesenjangan yang besar, khususnya jika Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin mengambil alih kewenangan pengelolaan CITES untuk spesies laut dari KLHK. Menurut UU pelaksana No. 1/2014, KLHK harus menyerahkan kewenangan pengelolaan untuk beberapa taman laut nasional ke KKP. Namun penyerahan wewenang ini belum terjadi.

## KESENJANGAN DAN TANTANGAN UTAMA

Walaupun kerangka hukum untuk perlindungan satwa liar dan peraturan perdagangan satwa liar telah dikembangkan dengan baik, terdapat sejumlah celah yang besar, yang dapat memfasilitasi atau memungkinkan terus berjalannya perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan spesies lain yang terancam di Indonesia. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan penting dalam implementasi yang dapat menghambat penegakan kerangka hukum yang ada. Bagian berikut adalah garis besar kesenjangan besar dan tantangan yang telah diidentifikasi oleh penelitian ini, dan membaginya kedalam lima bagian penting:

1. Cakupan Hukum
2. Deteksi dan Pelaporan
3. Penangkapan dan penahanan
4. Pendaftaran kasus dan tuntutan
5. Implementasi dan Penegakan

### Cakupan Hukum

#### **TANTANGAN UTAMA:**

1. PP No 7/1999 sudah usang dan lemah, sebagai turunan UU No. 5/1990, yang gagal untuk melindungi spesies yang terdaftar di CITES, dan spesies lain merupakan fokus pelestarian di Indonesia
2. Peraturan hanya berlaku pada spesies yang dilindungi secara nasional, dan tidak mengatur perdagangan spesies yang tidak dilindungi, atau mencakup ketentuan untuk spesies yang bukan berasal dari Indonesia tapi terdaftar di CITES. Spesies laut juga kurang dilindungi.
3. Keterbatasan perlindungan hukum terhadap spesies yang dilindungi yang berada diluar kawasan yang dilindungi.

Sebagaimana yang diterangkan di bagian awal, terdapat masalah serius pada daftar spesies yang dilindungi, dan ketentuan PP No. 7/1999, dibawah Undang-undang No. 5/1990. Permasalahan penting tersebut adalah:

- Daftar spesies yang dilindungi disetujui oleh peraturan pemerintah (ditandatangani oleh Presiden) pada tahun 1999, dan tidak pernah diperbarui, meskipun telah ada ketentuan Pasal 4 dari peraturan yang memperbolehkan Menteri untuk mengubah daftar tersebut. Banyak spesies yang dilindungi oleh CITES atau diakui terancam punah oleh badan internasional (misal. IUCN Red List) tapi tidak dilindungi oleh peraturan di Indonesia.
- Beberapa spesies yang termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi secara taksonomi tidak benar atau tidak lengkap. Misalnya, Gajah India (*Elephas indicus* atau lebih tepatnya *Elephas maximus indicus*) ada dalam daftar, tapi Gajah Sumatera (*E. m. sumatranus*) tidak; Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) terdaftar, tapi Orangutan Sumatera (*P. abelii*) tidak; dll.
- Jika daftar spesies yang dilindungi dimaksudkan untuk menghubungkan implementasi nasional CITES, dibutuhkan klasifikasi spesies yang lebih baik. Daftar ini hanya menyebutkan spesies yang dilindungi, tapi tidak ada peraturan untuk spesies yang tidak dilindungi. Terkait dengan implementasi CITES, akan lebih baik jika ada

kategori tambahan yang mengatur perdagangan untuk seperti spesies yang tidak dilindungi.

- Secara umum semua spesies yang ada dalam daftar spesies yang dilindungi, ada di Indonesia (kecuali Gajah India), tidak ada ketentuan untuk spesies yang tidak berasal dari Indonesia dan dilindungi CITES (misal. Gajah Afrika, subspecies harimau yang tidak berasal dari Indonesia). Oleh karena itu, bukan merupakan pelanggaran jika perdagangan spesies yang tidak berasal dari Indonesia dilakukan (walaupun impor dan ekspor harus diatur secara ketat menurut CITES). Hal ini menunjukkan celah besar.
- Sangat sedikit spesies laut yang ada dalam daftar spesies yang dilindungi, dan kewenangan yurisdiksi atas spesies laut tidak jelas (lihat di atas), karena spesies ini termasuk dalam Undang-undang Konservasi No. 5/1990, dan Undang-undang Perikanan No. 31/2004. Undang-undang Perikanan No. 31/2004 mengatur secara berbeda spesies ikan yang dilindungi dan mungkin akan tumpang tindih dengan daftar spesies yang dilindungi oleh Undang-undang Konservasi.
- Daftar dalam Peraturan Perusahaan No. 7/1999 hanya mencakup beberapa spesies prioritas yang mempunyai nilai konservasi besar di Indonesia. Bahkan amandemen yang sejalan dengan CITES dapat membuat Indonesia beresiko kehilangan banyak spesies satwa liar endemik.

Selain itu, banyak spesies yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 / 1999 memiliki populasi yang signifikan di luar kawasan yang dilindungi, di kawasan hutan yang seringkali tumpang tindih dengan lahan pertanian dan pemukiman masyarakat. Kawasan hutan ini seringkali merupakan habitat yang kritis bagi spesies kunci – sebagai contoh, terdapat 75% habitat orangutan tidak memiliki perlindungan hukum (SOCP 2014). Meskipun perlindungan hukum bagi spesies yang dilindungi diatur secara hukum, namun jika mereka ditemukan di luar kawasan yang dilindungi seringkali mereka dibunuh, diungsikan secara sengaja atau diperdagangkan secara ilegal. Pemilik tanah memiliki sedikit insentif untuk mengakui bahwa mereka memiliki spesies yang dilindungi di tanah mereka, dan dukungan atau relokasi dari pihak pengelola juga sedikit ketika kehadiran mereka ditemukan.

Meskipun Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dokumen (UKL-UPL) harus diselesaikan oleh pemilik konsesi pada saat tanah diperoleh, ada banyak masalah dengan penerbitan izin tersebut. Mereka sering dipandang hanya sebagai urusan administrasi yang kecil saja, dan sedikitnya pemeriksaan ketat terhadap dampak dari proyek yang diusulkan (WCS 2011). Bahkan di ketika dalam dokumen AMDAL dijelaskan mengenai dampak dari suatu kegiatan, deskripsi mengenai pengelolaan dampaknya atau penilaian kelayakan kegiatan sering kali tidak ditemukan (WCS, 2011). Anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga diminta untuk melakukan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sebagai bentuk penilaian konsesi mereka, yang menjadi salah satu aspek rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. Namun, penilaian HCV bukanlah persyaratan wajib di bawah hukum Indonesia, dan karena sedikitnya keterkaitan Antara HCV dan proses AMDAL, maka pengawasan terhadap rencana pemantauan pelaksanaan keanekaragaman hayati HCV seringkali terbatas (WCS 2011). Dalam hal apapun, perluasan areal kelapa sawit baru di bawah RSPO dengan definisi terbatas, membuat HCV kurang kuat sebagai alat untuk perlindungan spesies. Hal ini membuat para perusahaan non-RSPO yang merupakan penyebab terjadinya deforestasi, menghindari kewajiban perlindungan spesies mereka yang harus ditetapkan melalui proses AMDAL. Menghubungkan perlindungan habitat dan perlindungan spesies melalui kerangka hukum karena merupakan celah kritis yang harus diatasi.

## Deteksi dan Pelaporan

### **TANTANGAN UTAMA:**

1. Terbatasnya sumber daya untuk mendeteksi kejahatan.
2. Kurangnya pengetahuan/pelatihan untuk staf di lapangan.
3. Sanksi tidak berat jika staff tidak berhasil melakukan tugas dengan baik.
4. Terbatasnya tindak lanjut terhadap informasi yang terkait perdagangan satwa liar.
5. Jumlah polisi hutan, PPNS dan SPORC tidak mencukupi dibandingkan luas area, dan kewenangan hukum mereka terbatas. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memiliki sumberdaya yang setara dengan Polisi Hutan atau SPORC.

Deteksi yang dilakukan oleh pemerintah terbatas dan tidak punya cukup sumber daya. Deteksi sering dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, seperti Wildlife Conservation Society (WCS), Fauna dan Flora International (FFI), Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Profauna dan lainnya. Polisi Hutan/kemitraan dengan komunitas dapat menjadi salah satu sumber informasi, yang dapat ditingkatkan dan ditargetkan ke wilayah tertentu yang rentan.

Terdapat unit intelijen dalam struktur organisasi SPORC, tapi jumlah mereka yang sangat sedikit dan tidak memiliki sumber daya untuk memantau semua pusat perdagangan ilegal satwa di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tidak memiliki hal yang setara dengan polisi hutan atau SPORC. Dengan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, terdapat peluang untuk meningkatkan secara signifikan jumlah penyidik sipil dan meningkatkan kapasitas intelijen mereka melalui pelatihan khusus, dan program magang/pelatihan dengan kepolisian.

Kurangnya fokus pada pasar dan pusat transportasi, yang menjadi titik penting dalam perdagangan ilegal satwa liar. Disinilah petugas dari badan pemerintah lainnya (bandara dan keamanan pelabuhan, bea cukai, dll) dapat ikut serta untuk meningkatkan upaya pengawasan secara keseluruhan.

Pemantauan dan pelaporan kejahatan terhadap satwa liar juga merupakan hal yang sulit bagi anggota masyarakat, dan bahkan ketika laporan diterima, tingkat tindak lanjut seringkali rendah. Hal ini menurunkan motivasi LSM, anggota komunitas dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan kejahatan. Seiring dengan lebih canggihnya kejahatan terhadap satwa liar, untuk mendeteksi kejahatan sering memerlukan pelatihan dan peralatan khusus, tapi tidak tersedia ketika dibutuhkan – misalnya, untuk membuktikan jenis dan asal dari suatu spesies hewan dan tumbuhan di area pelabuhan tidak dapat dilakukan oleh Polisi Hutan dan Penyidik Kehutanan karena lokasi kejadian dibawah kewenangan Bea Cukai dan Karantina; sementara penyidik dari Bea Cukai dan Karantina tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk menyelidiki kejahatan kehutanan. Terdapat kurangnya sanksi dan insentif negatif bagi petugas yang gagal menjalankan tugasnya dengan benar.

## Penangkapan dan Penahanan

### **TANTANGAN UTAMA:**

1. PPNS Kehutanan tidak dapat menangkap tersangka “kejahatan terhadap satwa liar” kecuali mereka tertangkap pada saat melakukan tindakan. Penangkapan hanya bisa dilakukan polisi.
2. Proses hukum yang tidak benar seringkali terjadi setelah penangkapan atau penahanan, yang dapat berujung pada penghentian kasus pada tahap awal proses.
3. Kurangnya pengetahuan teknis penyidik kepolisian dan jaksa penuntut.
4. Penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah, dan tidak dapat berlangsung lebih dari 24 jam kecuali ancaman pidana yang dapat dikenakan lebih dari 5 tahun penjara.
5. Penyidikan perdagangan satwa liar terbatas ke penyidik yang tidak memiliki keahlian dalam perdagangan satwa liar.

Terdapat berbagai tantangan prosedural yang terkait dengan protokol penangkapan dan penahanan. Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar berada dibawah yurisdiksi kepolisian, polisi hutan (Polhut), dan penyidik kehutanan sipil (PPNS). Polisi hutan tidak secara otomatis mendapatkan kewenangan untuk menyelidiki kejahatan terhadap satwa liar atau bertindak sebagai PPNS – hanya sejumlah terbatas polisi hutan atau staff kehutanan yang mempunyai izin untuk melakukan penyidikan. Namun, PPNS kehutanan tidak dapat langsung menangkap tersangka kejahatan terhadap satwa liar, mereka harus melibatkan kepolisian. Sebaliknya, UU No. 41/1999 memberi kewenangan bagi PPNS kehutanan untuk melakukan penangkapan tersangka kejahatan kehutanan.

Surat perintah diperlukan polisi hutan untuk melakukan penangkapan, yang membutuhkan bukti permulaan yang cukup, kecuali tersangka tertangkap ketika melakukan tindakan ilegal. Penangkapan tidak dapat berlaku lebih dari 24 jam, dan pada saat penangkapan tersangka punya hak untuk diberitahu informasi tuntutan. Surat perintah dapat dikeluarkan ketika individu secara kuat diduga melakukan pelanggaran, bukti yang ada mencukupi dan ada kekhawatiran individu tersebut akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau kembali melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dapat membenarkan penahanan harus diancam dengan hukuman 5 tahun penjara, sesuai dengan UU No. 5/1990.

Ketika penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku, maka individu yang ditangkap punya hak untuk meminta sidang pra-peradilan untuk bisa bebas. Pengelolaan proses prosedural yang buruk seringkali berujung pada terhambatnya kasus potensial pada tahap ini.

Internet dan media sosial telah mengubah cara perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa yang dilindungi sering terjadi melalui akun sosial media dan konsumen ke konsumen langsung melakukan perdagangan di internet. Terdapat kerangka hukum untuk membatasi perdagangan online; ketentuan pidana dalam UU No. 5/1990 masih berlaku jika bukti mencukupi bisa didokumentasikan, dan UU No. 11/2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai klausul khusus terkait perdagangan barang terlarang, yang dapat mencakup spesies yang dilindungi. Terdapat sanksi yang besar – dalam UU No. 28 (1) hukuman yang berlaku adalah enam tahun penjara dan/atau denda 1 milyar Rupiah. Namun, UU No. 11/2008 memberi mandat penyidik sipil khusus untuk mengelola kasus online, dan

penyidik kehutanan tidak mempunyai kewenangan dalam kasus-kasus seperti ini meskipun mereka memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan untuk membangun kasus. Tantangan kedua adalah Undang-undang Konservasi belum mengatur penggunaan foto, video atau file elektronik sebagai barang bukti dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

## Pendaftaran Kasus dan tuntutan

### **TANTANGAN UTAMA:**

1. Hukuman ringan untuk kejahatan terhadap satwa liar, sehingga tidak memberikan efek jera.
2. Penentuan kerugian negara digunakan polisi atau jaksa penuntut sebagai dasar sejauh mana tuntutan terhadap tersangka, namun hal ini sulit untuk ditentukan.
3. Kurangnya kolaborasi antara polisi hutan, penyidik sipil dan polisi diberberapa kasus.
4. Terbatasnya kolaborasi, dan tidak ada prosedur standar, antara BKSDA/Kehutanan dengan polisi/militer dalam tuntutan kejahatan terhadap satwa liar.

Jaksa penuntut sering bermasalah dengan terbatasnya pengetahuan mengenai pilihan untuk memaksimalkan tuntutan untuk tersangka, dan pengetahuan teknis yang buruk terkait masalah perdagangan satwa liar memainkan peranan dalam hal ini. Walaupun kemungkinan hukuman dalam berbagai undang-undang cukup berat (bertahun-tahun penjara dan denda yang cukup besar), dalam prakteknya hukuman yang diberikan biasanya cukup rendah. Lampiran A merangkum sejumlah kasus dan hasil peradilan yang mencerminkan hal ini. Misalnya, perkiraan kerugian negara sering diminta polisi atau jaksa penuntut sebagai dasar pembuatan tuntutan kepada tersangka. Namun, dalam sistem hukum, undang-undang yang ada sekarang tidak mengatur pedoman untuk menentukan angka ini, walaupun kerugian dihitung berdasarkan nilai yang ada di pasar, bukan berdasarkan nilai di masa mendatang yang harus ditanggung negara sehubungan dengan penyediaan jasa ekosistem hutan (misal. Peraturan iklim, pencegahan banjir, dll). Misalnya, potensi pendapatan pariwisata dari satu pari manta diperkirakan senilai \$ 1 juta USD per tahun (WCS, 2014). Undang-undang Konservasi Indonesia dan Kehutanan juga tidak memungkinkan transportasi yang digunakan untuk disita dan dijual. Dengan memperketat peraturan ini, bersamaan dengan perbaikan pelatihan teknis dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar dengan memberikan jaksa penuntut kepercayaan diri untuk membreikan hukuman yang lebih tinggi.

Selain itu, kasus kejahatan terhadap satwa liar, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan hewan di Indonesia, dalam beberapa kesempatan dihubungkan dengan militer dan kepolisian. Saat ini, terdapat kemitraan yang kurang baik antara penyidik sipil dan institusi yang terkait dengan kasus ini, dan kerjasama umumnya tidak dilakukan dengan staf senior pada tahap awal.

### **Studi Kasus: Unit Kejahatan terhadap satwa liar**

Berawal pada tahun 2013, Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program telah merintis pendekatan inovatif terhadap kerjasama dengan badan penegakan hukum Indonesia di skala lokal, regional dan nasional untuk memberantas perdagangan ilegal satwa liar. Unit Kejahatan terhadap satwa liar (WCU), menyatukan kemitraan inovatif dengan lembaga penting pemerintah, termasuk KLHK, KKP dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Bea Cukai, jaringan organisasi sipil dan media. Lebih dari 290 kasus percontohan telah dilakukan penuntutan oleh badan penegakan hukum pemerintah berdasarkan informasi yang diberikan WCU, dengan tingkat kesuksesan sebesar >85% dan mencakup 10 kasus kejahatan terhadap satwa liar terbesar yang pernah dituntut di Indonesia. Hal ini tidak tertandingi di konteks Asia Tenggara. Pendekatan WCU termasuk penetapan jaringan informan disekitar wilayah penting, dan di pasar-pasayang yang merupakan titikpenting dan pusat transportasi; menggunakan penyidik yang terlatih untuk mengumpulkan bukti dengan cara yang tepat sehingga dapat digunakan di pengadilan; setelah penangkapan target, membantu pemerintah terkait kasus di pengadilan pidana, memastikan bukti dikelola secara tepat dan semua undang-undang yang terkait dengan kasus digunakan; membangun kapasitas penyidik, jaksa penuntut dan hakim agar semua kasus dapat dijalankan secara adil dan bekerja sama dengan organisasi media untuk meningkatkan kesadaran mengenai tuntutan yang sukses.

## **Implementasi dan Penyelenggaraan**

### **TANTANGAN UTAMA:**

1. Konflik antara undang-undang yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpangtindih dan tanggung jawab yang tidak jelas.
2. Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada diluar kawasan yang dilindungi.
3. Terbatasnya hukum adat dan praktek yang ada untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar.
4. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di CITES tidak berdasarkan data ilmiah yang cukup dan tidak dikontrol dengan cukup.

Undang-undang No. 5/1990 adalah dasar konservasi sumber daya alam dan spesies di Indonesia. Namun, Undang-undang No. 27/2007 mengenai Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak konsisten dengan undang-undang No. 5/1990. UU No. 5/1990 secara umum mengatur seluruh area konservasi, baik di darat maupun di laut. Sementara UU No. 27/2007 lebih fokus pada pengelolaan area konservasi laut dan pesisir. Tumpang-tindih mandat berdampak pada tantangan implementasi (misal. Tumpang-tindih/kesenjangan budget, dan kewenangan yang tumpang-tindih) di lapangan, dan memungkinkan jaringan perdagangan satwa liar untuk mengambil keuntungan dari kesenjangan penyelenggaraan peraturan ini. Selain itu, UU No. 5/1990 dan UU No. 31/2004 mengenai Perikanan sama-sama mempunyai ketentuan mengenai satwa yang dilindungi, tapi peraturan turunan UU No. 5/1990 (Peraturan Pemerintah No.7/1999 dan No. 8/1999) dianggap jauh lebih komprehensif.

Namun kemudian hal ini berubah ketika diterbitkannya peraturan menteri untuk kontrol perdagangan kuota perdagangan spesies laut dan perikanan, sementara kedua PP terkait spesies yang dilindungi masih kurang berkembang untuk spesies laut.

Dengan meningkatnya pembagian kekuasaan pemerintah ke pemerintah daerah terdapat bahaya dalam implementasi peraturan konservasi yang ada di tingkat daerah karena terdapat kemungkinan perbedaan prioritas. Misalnya, meskipun UU No, 5/1990 tidak memberikan kewenangan ke daerah, Peraturan Pemerintah No. 38/2007 mendelegasikan sebagian kekuasaan kepada provinsi untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan konservasi laut. Hal ini telah memungkinkan beberapa daerah untuk mencanangkan spesies yang dilindungi di daerah tersebut, seperti deklarasi kabupaten Raja Ampat sebagai suaka hiu dan pari yang dilakukan oleh pemerintahan Papua Barat. Ada peluang peraturan ini dilaksanakan dengan cara yang positif, walaupun kehati-hatian diperlukan untuk memastikan bahwa ada konsistensi antara target perlindungan pemerintah provinsi dan pusat. Dalam teori, reformasi yang menyeluruh di daftar spesies Indonesia dapat menghilangkan kebutuhan untuk bergantung pada peraturan provinsi ini.

Lebih jauh lagi, kerangka hukum yang ada, khususnya di UU No.5/1990, tidak mengakomodasi hukum adat atau praktek penduduk lokal dalam mengatur kepemilikan dan hak penggunaan sumber daya. Dalam konteks kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan spesies yang dilindungi, misalnya seperti sistem Sasi di Maluku dan Panglima Laot di Aceh dapat digunakan untuk mencegah atau mengatur panen spesies.

Terdapat tantangan tambahan dalam pelaksanaan dan implementasi secara legal dari kuota “yang menyatakan tidak ada kerugian” pada spesies yang ada di dalam daftar CITES. Proses penentuan kuota di Indonesia mengalami tantangan yang cukup besar dimana pada masa lalu dilaksanakan dengan kurang baik dan mudah untuk disalahgunakan. Kekurangan data ilmiah yang mencukupi untuk menentukan panen yang tidak merugikan kemungkinan masih menjadi tantangan bagi banyak spesies. Dalam masalah terkait, terdapat juga pemikiran adanya penyelundupan besar-besaran dari satwa liar yang ditangkap secara ilegal dan kemudian dimasukkan ke pusat penangkaran diseluruh Indonesia. Misalnya, kajian tahun 2011 melaporkan setidaknya 80% dari piton hijau (*Morelia viridis*) yang diekspor dari pusat penangkaran di Indonesia ditangkap secara ilegal di alam liar (Lyons dan Natusch, 2011). Data ekspor dari penangkaran banyak spesies reptil, misalnya, sering melebihi kapasitas reproduktif dari jumlah hewan di penangkaran yang dilaporkan (TRAFFIC, 2012). Satwa dari Indonesia juga diselundupkan ke negara tetangga, dan kemudian diekspor oleh negara tersebut sebagai satwa domestik atau berasal dari penangkaran (TRAFFIC, 2012).

## TEMUAN KAJIAN

Temuan dan kemungkinan rekomendasi dari kajian ini dapat dibagi menjadi dua hal: (1) reformasi kerangka hukum yang ada dan/atau kebijakan dan rencana yang diambil dari kerangka hukum, yang dapat mencakup pengembangan hukum, kebijakan atau rencana baru; dan (2) reformasi atau amandemen cara kerangka hukum dilaksanakan. Bagian dibawah ini menjelaskan setiap poin dengan rinci, dan merangkum bagaimana kemungkinan intervensi dan aksi untuk menjawab tantangan yang dibahas diatas.

### Reformasi Peraturan dan Kebijakan

#### Peraturan Menteri

Penerbitan peraturan menteri dapat menjadi solusi yang manjur, dan cukup cepat untuk beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam mencegah perdagangan ilegal satwa liar. Contoh baru-baru ini terkait potensi kemampuan dalam area konservasi atau dilindungi, dan pengelolaan yang berkesinambungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Reformasi peraturan ini antara lain:

- Peraturan Menteri 2/2015 yang melarang pukat tarik dan pukat hela di seluruh area pengelolaan perikanan Indonesia (WPPs). Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya yang hampir habis, dan untuk menghentikan penangkapan ikan berlebihan;
- Peraturan Menteri 4/2015 yang melarang penangkapan ikan di wilayah pembibitan dan lahan bertelur dalam WPP 714 (Pengelolaan Perikanan area Laut Banda, mulai dari Sulawesi Timur ke Pulau Kei). Hal ini akan menghasilkan, jika dilaksanakan, penurunan bertahap penangkapan ikan dengan kapal ikan besar di area seluas 1,100 km dari barat ke timur, dan 650 km dari utara ke selatan;
- Peraturan Menteri 56/2014 yang menunda sementara penerbitan izin penangkapan ikan (penangkapan ikan, atau SIPI, lisensi perusahaan ikan atau SIUP, lisensi transportasi ikan atau SIKPI) diseluruh Indonesia;
- Peraturan Menteri 59/2014 yang melarang ekspor (tapi tidak penangkapan ikan) dari hiu *whitetip* dan hiu martil dari Indonesia;
- Peraturan Menteri 1/2015 melarang pengambilan lobster yang sedang dalam masa bertelur (*Panulirus spp*, *spiny lobster*), kepiting (*Scylla spp*, kepiting termasuk kepiting bakau), dan Rajungan Biru (*Portunus pelagicus*). Diterapkan juga batas minimum untuk ketiga kelompok di atas.

Reformasi ini memperlihatkan potensi kekuatan dari kepemimpinan yang berkomitmen dalam Kementerian, dimana terdapat keinginan untuk menerbitkan peraturan menteri yang menyeluruh atau keputusan menteri. Jika peraturan ini digunakan sebagai cetak biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) misalnya, hal ini berpotensi meningkatkan perlindungan hukum terhadap spesies yang saat ini tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi tapi mengalami eksploitasi berlebihan, atau memberlakukan sanksi yang lebih ketat untuk hilangnya habitat di dalam wilayah hutan. Namun, diperlukan kehati-hatian. Sejumlah besar peraturan menteri, khususnya di banyak Kementerian, dapat juga menciptakan celah tambahan dan tantangan pelaksanaan bagi badan pelaksana di lapangan jika mereka tidak merancang dan berkoordinasi dengan baik. Misalnya, biaya operasi pelaksanaan Peraturan Menteri 2/2015 sangat besar, dan saat ini tidak efektif dilakukan karena keadaan sumber daya di KLHK. Selain itu, peraturan menteri hanya dapat

diterbitkan untuk mendukung implementasi undang-undang yang lebih tinggi yang berlaku (misal. Undang-undang) dan tidak dapat memberikan sanksi pidana. Oleh karena itu, saat hukum yang ada mempunyai kesenjangan yang besar, terdapat kekhawatiran bahwa peraturan menteri tidak dapat memberikan solusi hukum yang cukup kuat untuk tantangan yang ada. Beberapa keterbatasan peraturan menteri terlihat dari tantangan yang dihadapi oleh pelaksanaan rencana aksi spesies dan keanekaragaman hayati Indonesia seperti dibawah ini.

### Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati dan Spesies

Berdasarkan Pasal 6 Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia telah mengembangkan sejumlah rencana aksi spesies tertentu dan rencana aksi keanekaragaman hayati secara menyeluruh untuk Indonesia (lihat bagian sebelumnya). Namun dokumen-dokumen ini tidak mengikat secara hukum dan hanya berdasarkan peraturan dari Kementerian, dimana cakupannya juga termasuk sektor lain, dan mempunyai relevansi untuk berbagai tingkatan pemerintah. Dampak dari rencana kerja dan anggaran dalam berbagai unit implementasi di Kementerian terkait tidak merujuk pada Strategi atau Rencana Aksi, sehingga aksi yang tertera di rencana seringkali tidak punya anggaran yang cukup atau bahkan tidak punya alokasi anggaran dan pelaksanaannya seringkali dilakukan oleh beberapa kelompok LSM, bukan oleh pemerintah. Jika rencana aksi dan strategi ini akan dimasukkan dalam prioritas pemerintah, mereka harus didukung dengan undang-undang, mungkin dalam revisi UU No. 5/1990. Agar bisa mengikat secara hukum, rencana aksi spesies harus dihubungkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJM. Terkait dengan hal ini, institusi seperti BAPPENAS harus dilibatkan sejak tahap awal hingga fasilitasi perencanaan.

## **Reformasi Hukum**

### UU No.5/1990

Pasal VIII CITES menyatakan bahwa semua pihak harus melakukan upaya yang tepat untuk melaksanakan ketentuan Konvensi yang ada dan melarang perdagangan spesies yang merupakan pelanggaran konvensi. Upaya-upaya yang dilakukan termasuk: (a) menghukum perdagangan, atau kepemilikan dari spesies, atau keduanya; dan (b) melakukan penyitaan atau pengembalian ke negara jika spesies diekspor. Selain upaya-upaya tersebut, pihak terkait dapat, jika dinilai perlu, menyediakan metode penggantian internal untuk pengeluaran yang terjadi karena penyitaan spesies yang diperdagangkan sebagai pelanggaran upaya yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan konvensi yang ada. Kerangka hukum saat ini, yang berdasarkan pada UU No. 5/1990, tidak memberikan upaya menyeluruh, terutama untuk spesies yang tidak dilindungi.

Terdapat sejumlah saran revisi yang sesuai dengan UU No. 5/1990. Hal ini mencakup:

#### *Revisi Perlindungan Spesies*

1. UU No. 5/1990 harus memasukkan perubahan dan perkembangan daftar spesies CITES, dan berusaha menjawab perubahan daftar CITES di masa datang. Daftar spesies harus memastikan bahwa semua spesies di daftar CITES dilindungi hukum dan peraturan Indonesia, memastikan bahwa spesies yang tidak asli dari Indonesia tapi berada dalam daftar CITES tidak dapat diperdagangkan antar negara (misal. Gading gajah Afrika). Pertimbangan harus dibuat untuk memastikan bahwa spesies

yang banyak terdapat di Indonesia tapi terancam punah ditempat lain juga harus dilindungi untuk memastikan Indonesia tidak menjadi pusat perdagangan satwa liar yang terancam punah.

2. Daftar spesies yang ada sekarang (Annex, Peraturan Pemerintah No.7/1999) harus diamandemen untuk memperlihatkan perubahan dalam status taksonomi dari spesies yang terdaftar, misal. Orangutan Sumatera (*Pongo abeli*), dan daftar juga harus fleksibel terhadap perubahan status spesies ini dimasa depan. Error yang ada di daftar harus diperbaiki, misalnya dari Gajah India (*elephas indicus*) menjadi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan Gajah Kalimantan (*Elephas masimus boneensis*). Pemerintah, dengan pertimbangan dari lembaga ilmiah (LIPI), harus menggunakan Pasal 4 paragraf (3) dari Peraturan Pemerintah No.7/1999 untuk melakukan adaptasi dari status yang terancam punah dengan mengubah status perlindungan mereka. Terdapat perbedaan pendapat apakah hal ini bisa dilakukan oleh KLHK dengan Keputusan Menteri, atau hal ini membutuhkan peraturan pemerintah yang baru.
3. Sebagai tambahan, setiap revisi UU No.5/1990 harus mempertimbangkan penghapusan skema “yang dilindungi vs yang tidak dilindungi” yang ada sekarang. Salah satu pilihan untuk revisi adalah untuk mengkategorikan spesies kedalam tiga status perlindungan: (1) spesies yang dilindungi, yang termasuk spesies yang hampir punah dan semua spesies di Appendix I CITES; (2) spesies yang dikontrol dengan ketat, yang mencakup spesies yang rentan terhadap perdagangan dan Appendix II CITES; dan (3) spesies yang perdagangannya harus dimonitor untuk menghindari berkurangnya populasi. Semua kategori spesies harus cukup diatur, termasuk ketentuan mengenai pelarangan (penjara dan denda), sanksi dan penyitaan.
4. Lebih jauh lagi, revisi UU No. 5/1990 harus memastikan adanya pasal yang mengatur pengenalan spesies yang dianggap mengancam dari luar, dan intra-regional di Indonesia, menghindari kerusakan pada spesies asli. Selain itu, Peraturan Pemerintah No.7/1999 harus terus beradaptasi sesuai dengan populasi satwa liar di alam liar. Pemerintah, dengan pertimbangan lembaga ilmiah, harus menggunakan Pasal 4 ayat (3) dari PP No. 7/1999 untuk beradaptasi dengan perubahan status satwa liar dengan membuat perubahan pada status perlindungan mereka.

#### *Revisi untuk memasukkan denda yang lebih tinggi dan sanksi minimum dan maksimum*

Revisi ini harus mencakup sanksi pidana seperti penjara, denda, pencabutan hak sipil dan pengambil alihan dan penyitaan. Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi minimum dan maksimum sesuai dengan kategori spesies dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Saat ini sanksi maksimum adalah lima tahun penjara dan hal ini tidak cukup untuk memberikan efek jera. Sanksi pidana juga harus mencakup tanggung jawab perusahaan. Pengambilalihan dan penyitaan juga harus mencakup peralatan dan kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sanksi administratif harus dilakukan pada perusahaan swasta yang melanggar undang-undang. Revisi harus mencakup supervisi dan akuntabilitas pihak penegak hukum yang lebih baik untuk mencegah dan memberantas kejahatan terhadap satwa liar.

#### *Revisi mencakup perlindungan spesies dan habitatnya*

Revisi harus dapat melarang dan menghukum perusakan habitat dari spesies yang dilindungi, dan harus ada ketentuan mengenai cara menuntut tindakan ini di luar dan di dalam area yang dilindungi. Salah satu pilihan adalah untuk melakukan amandemen UU No. 5/1990 dimana definisi “habitat kritis minimum” untuk pelestarian spesies di Indonesia, seperti yang terdaftar di UU. Hal ini mengharuskan lembaga pengelola/ilmiah, seperti LIPI, untuk

megembangkan metodologi yang tepat untuk membuat definisi dari area habitat, dan dimana selain area yang dilindungi, sesuai dengan sumberdaya dan pedoman pengelolaan mereka.

#### *Revisi klausa eksklusif*

Revisi/penghapusan klausa pelolosan atau pengecualian yang dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan kejahatan, misalnya menggunakan satwa yang terancam punah sebagai hadiah, harus dihapuskan. UU No. 5/1990 mengandung pernyataan yang dapat menghasilkan salah penafsiran, misalnya bahwa ketentuan atau pertukaran tanaman dan satwa dengan pihak lain diluar negeri termasuk dalam kategori penyelamatan dan adalah bagian dari pelestarian spesies (Pasal 22 ayat (2)).

#### *Revisi untuk meningkatkan kewenangan Polisi Hutan dan Penyidik Sipil*

Polisi hutan harus diberikan kewenangan lebih untuk melakukan penggeledahan atau melakukan penangkapan untuk kejahatan terhadap satwa liar. Penyidik sipil juga harus diberdayakan untuk bisa berkoordinasi dengan penyidik lain, seperti di pelabuhan domestik dan internasional, jika ada keterlibatan dengan kejahatan. Penyidik sipil dari KLHK juga harus dapat berkomunikasi langsung dengan jaksa penuntut demi proses tuntutan yang lebih efisien. Beberapa amandemen dapat dicapai melalui revisi UU No. 32/2009.

#### *Revisi memasukkan pedoman kebijakan mengenai konflik manusia-satwa liar*

Revisi undang-undang harus memasukkan pedoman yang menetapkan protokol standar untuk konflik manusia-satwa liar dan untuk menetapkan peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan (misal. BKSDA, PHKA, Pemerintah Daerah, dll) dalam mengatur dan mengurangi konflik ini. Revisi juga harus memasukkan dasar hukum untuk penempatan dan pemeliharaan satwa liar yang dilindungi di lokasi penyelamatan hewan yang merupakan hasil dari proses penegakan hukum.

#### *Revisi yang memungkinkan gugatan perdata*

Amandemen UU No.5/1990 dapat memasukkan pasal yang mendorong gugatan perdata dan partisipasi komunitas dalam penegakan hukum, misalnya dengan memungkinkan gugatan perdata gugatan perwakilan kelompok *class action*, atau tindakan hukum yang diambil terhadap aparat pemerintah karena kelalaian, kecerobohan, atau kegagalan untuk menegakkan undang-undang yang ada.

Dalam undang-undang lingkungan hidup, "*polluter-pays-principle*" (orang yang membuat polusi harus membayar) telah banyak digunakan sebagai bagian dari kewajiban yang lebih ketat bagi perusahaan yang melakukan kejahatan. Ketentuan tersebut dapat dimasukkan kedalam Undang-undang Konservasi, Kehutanan, Kelautan atau Perikanan.

#### *Revisi yang berhubungan dengan perdagangan online dan penggunaan bukti elektronik*

Amandemen memungkinkan penyidik kehutanan untuk melakukan penyidikan perdagangan online spesies yang dilindungi, dan dapat menggunakan foto, video atau dokumen elektronik sebagai bukti dalam kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan.

#### *Penghapusan ambiguitas beberapa pasal*

Pasal 25 ayat (1) UU No. 5/1990 berbunyi “Pelestarian tanaman dan satwa yang dilindungi dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau proliferasi oleh institusi yang dibuat untuk tujuan tersebut”. Pasal ini dapat disalahgunakan oleh individu yang telah meminta izin pemerintah untuk mendirikan organisasi konservasi untuk memelihara tanaman dan satwa. Tanaman dan satwa yang dipelihara seringkali tidak diketahui asal dan legalitasnya, dan aplikasi untuk pembuatan organisasi konservasi hanya digunakan sebagai metode untuk menghindari hukum.

Penggunaan kata “dan” dalam Pasal 21 (a) dan (b) membuat penyidik mengalami kesulitan untuk memasukkan lebih dari satu pasal pada pelaku kejahatan terhadap satwa liar ketika mereka melakukan lebih dari satu jenis pelanggaran.

#### UU No. 26/2007, Peraturan Pemerintah No. 26/2008

Undang-undang dan peraturan ini memerlukan amandemen terutama karena menyebutkan klasifikasi penggunaan tanah tanpa secara jelas menunjuk lembaga yang mengelola area tersebut. Dalam konteks kejahatan terhadap satwa liar, hal ini dapat berujung pada konflik pengelolaan tanah, atau tidak adanya badan pengelola cagar alam atau kawasan lindung, sehingga aktivitas ilegal dapat terjadi. Misalnya, Appendix VIII PP No, 26/2008 mengenai Area Lindung Nasional, Taman Wisata Laut (TWAL) Pulau Togean dan Pulau Batudaka terdaftar. Namun, area yang sebelumnya dialokasikan untuk menjadi taman nasional oleh keputusan menteri (Taman Wisata Laut Nasional Togean, Keputusan Menteri Kehutanan No. 418/2004). Dengan menggunakan appendix UU No. 26/2008, kabupaten menolak mengakui status taman nasional, karena peraturan pemerintah mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari keputusan menteri.

Ketidajelasan rencana tata ruang adalah salah satu faktor pendorong perambahan kawasan hutan, yang meningkatkan konflik antara manusia – satwa liar dan memberikan kesempatan bagi pemburu liar dan terjadinya kejahatan terhadap satwa liar. Peraturan gabungan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai “Prosedur Pemukiman Terkait Dengan Kepemilikan Lahan di Area Hutan”<sup>14</sup> adalah langkah kedepan yang penting, walaupun beberapa celah mengenai kepemilikan lahan dalam kawasan yang dilindungi telah diidentifikasi dan memerlukan revisi. KLHK telah menargetkan transfer kontrol sebesar 12.7 juta ha area hutan produksi/hutan lindung kepada publik sebagai hutan desa atau dengan skema komunitas berbasis pengelolaan hutan. Untuk melakukan hal ini, Kementerian harus mempercepat resrukturisasi dan memperkuat batasan daerah, dan harus mengintegrasikan peta batas hutan ke Badan Pertanahan Nasional. Tahap ini diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai batas hutan negara dan Area Penggunaan Lain (APL), yang akan membantu pemerintah daerah dan pusat untuk melaksanakan tata kelola ruang yang lebih efektif, dan pelaksanaan yang mempunyai target untuk menurunkan hilangnya habitat dan konflik manusia dengan satwa liar.

#### No. 31/2004 - Perikanan

---

<sup>14</sup> Nomor 79, 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, dan Nomor 8/SKB/X/2014

Terdapat banyak tumpang tindih antara kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tumpang tindih ini menciptakan celah dan inkonsistensi dalam implementasi yang menciptakan kesempatan untuk melakukan aktivitas ilegal, dan eksploitasi habitat dan spesies. Celah tersebut antara lain:

#### *Ambiguitas definisi “ikan”*

UU No.31/2004 (yang diamandemen melalui UU No. 45/2009) mendefinisikan ikan sebagai “organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya ada didalam air”. Definisi ini secara signifikan memperbesar definisi ilmiah ikan, misalnya salah satu dari tiga klasifikasi (tidak mempunyai rahang, kartilaginosa dan bertulang) vertebrata berdarah dingin (poikilothermal) yang hidup di air dan mempunyai sirip, insang permanen untuk bernapas, dan, biasanya bersisik. Selain inkonsistensi dengan definisi ilmiah, definisi legal ini menciptakan konflik dengan undang-undang dan peraturan terkait satwa liar atau hewan.

#### *Ketidakjelasan area pengelolaan*

KKP diberi mandat untuk mengelola wilayah perairan yang dilindungi di darat dan laut, termasuk sungai, danau, rawa, bakau. Sementara KLHK juga diberi kewenangan untuk melindungi area konservasi dan cagar alam termasuk danau, sungai, pesisir dan pulau. Hal ini perlu diselesaikan melalui kolaborasi efektif antar Kementerian dan komunikasi yang lebih baik mengenai mandat yang tumpang-tindih. Hal ini penting karena saat ini KLHK mendefinisikan dan menyatakan area hutan dan perairan di setiap provinsi yang digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengembangkan rencana tata kelola lahan. Tanpa koordinasi dalam bidang manajemen, perencanaan yang efektif akan sulit dilakukan.

#### *Tumpang Tindih antara badan pengelola CITES*

Badan yang bertugas mengelola CITES saat ini adalah KLHK, tapi KKP mengelola konservasi spesies yang termasuk dalam kategori “ikan”, termasuk buaya, kura-kura, mamalia air tawar dan laut, batu karang, kepiting, dan ikan. Perundang-undangan nasional berdasarkan UU Np. 5/1990 telah dinilai CITES memenuhi semua persyaratan implementasi CITES. Namun, keputusan harus dibuat mengenai apakah KKP harus menjadi lembaga pengelola tambahan untuk spesies laut agar bisa menyelesaikan masalah mandat yang tumpang tindih. Jika ya, UU No. 31/2004 mengenai Perikanan dan UU No. 45/2009 harus di amandemen untuk memenuhi persyaratan CITES, sebelum adanya aplikasi ke CITES untuk perubahan status. Namun, peningkatan kapasitas dibutuhkan oleh kedua lembaga untuk memastikan prosedur yang benar untuk penerbitan izin, kontrol panen, dan penegakan hukum yang efektif.

## **Implementasi**

Penegakan kerangka hukum yang ada dapat dilakukan dengan dua bentuk: pencegahan (atau *ex ante*, sebelum kejahatan terjadi) atau Pengendalian/represif (*ex-post*, setelah kejahatan terjadi). Saat ini di Indonesia, kurang ada penekanan pada upaya pencegahan yang secara mengantisipasi atau menghambat perdagangan satwa liar. Upaya pencegahan yang efektif membutuhkan penggunaan upaya represif yang lebih sedikit, dan harus diberikan prioritas lebih dalam pelaksanaan penegakan hukum. Rekomendasi termasuk:

### Pencegahan berbasis lapangan

Peningkatan prioritas upaya pencegahan di lapangan untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar melalui patrol PHKA/komunitas telah terbukti efektif dalam membatasi atau mencegah kejahatan terhadap satwa liar. Hal ini bisa dilakukan oleh individual dan bekerjasama dengan LSM, swasta (misal. pemilik perkebunan, pemilik konsensi) dan pemerintah daerah.

### Membangun kapasitas di sektor peradilan

Peningkatan kapasitas teknis dari peradilan dan penuntutan terkait kejahatan terhadap satwa liar termasuk pemberian hukuman yang tepat dan maksimum/minimum untuk memastikan hukuman yang tepat diberikan.

Terdapat kurangnya kesadaran di sistem peradilan, jaksa penuntut dan penyidik mengenai dampak ekonomi dari kejahatan terhadap satwa liar dan kejahatan hutan, yang nilainya sangat besar jika penilaian lingkungan hidup yang benar dilakukan. Nilai pasaran satwa liar dan produk dari satwa liar dapat menjadi indikator betapa seriusnya jenis kejahatan ini, tapi bahkan hal ini tidak mencakup kerugian ekonomi yang lebih besar karena hilangnya satwa liar atau habitatnya. Kesadaran publik mengenai kemauan untuk menerapkan hukuman yang berat untuk kejahatan terhadap satwa liar dan kejahatan kelautan dan kehutanan dapat menjadi efek jera yang baik. Dalam konteks pemberian sanksi denda misalnya, tingkat denda dapat memperhitungkan kerugian negara di masa kini dan masa datang sebagai hasil dari tindakan pidana di sektor konservasi.

Selain itu, pelaku dapat dihukum untuk membayar seluruh biaya penegakan hukum dan peradilan, termasuk biaya yang ditimbulkan karena perawatan tanaman dan satwa liar. LSM di Indonesia memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mendukung kapasitas pembangunan dan harus terus didorong oleh pemerintah, termasuk meningkatkan kerjasama dengan sektor peradilan.

### Membangun kapasitas penyidik sipil

UU No. 5/1990 merujuk pada “bagian” satwa – menentukan apakah bagian tersebut berasal dari satwa liar legal, membutuhkan kemampuan khusus, dan penyidik seringkali tidak dapat atau tidak mau melakukan penyitaan atau memerintahkan penahanan sebelum ada kejelasan. Misalnya, perhiasan yang diduga berasal dari gading membutuhkan tes laboratorium untuk memastikan apakah benar gading yang digunakan. Meningkatkan kapasitas penyidik sipil diperlukan untuk mendukung pengertian yang lebih baik mengenai penggunaan analisa forensik untuk mendukung tuntutan, dan bagaimana cara penggunaan analisa yang baik. Hal ini membutuhkan pelatihan regular dan kerjasama dengan laboratorium forensik, seperti Eijkman Institute.

### Menetapkan dan mendukung pendekatan *multi-door* dalam melakukan tuntutan

Secara paralel, pemerintah harus menerapkan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk penegakan hukum, dengan menggunakan lebih dari satu undang-undang untuk memastikan tuntutan yang sukses, misal pendekatan “*multi door*”. Pendekatan baru untuk melakukan penuntutan diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012, tapi belum digunakan secara maksimum karena terbatasnya pengalaman dan kesadaran dari polisi dan jaksa penuntut

dalam menggunakan strategi ini untuk penyidikan dan tuntutan. Undang-undang yang relevan terkait kejahatan terhadap satwa liar dapat mencakup undang-undang yang terkait dengan kehutanan, lingkungan hidup, konservasi, perikanan, karantina dan bea cukai, korupsi dan pencucian uang. Kejahatan kehutanan atau kelautan dapat dituntut dalam UU alternatif dimana hukuman lebih panjang dan denda lebih besar. Misalnya, tuntutan pedagang pari manta baru-baru ini yang sukses tidak dilakukan dengan UU No. 31.2004 terkait perlindungan spesies, karena hukuman tidak berat. Jaksa penuntut menggunakan Pasal 26 UU No. 45/2009 mengenai Perikanan, dan menuntut pedagang karena gagal untuk mendapatkan izin untuk melakukan ekspor untuk spesies yang diperdagangkan.

Ketentuan mengenai pelanggaran pidana terkait kejahatan terhadap satwa liar dapat mencakup berbagai UU, termasuk Hukum Pidana (KUHP), UU No. 39/2009 mengenai Hak Asasi Manusia, UU No. 31/1999, UU No. 20/2001 mengenai Korupsi, UU No.23/1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No, 5/1997 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No.41/1999 mengenai Kehutanan, UU No. 15/2002 mengenai Pencucian Uang. Dalam pendekatan “*multi-door*” yang ideal, satu badan untuk memimpin tuntutan kasus yang melibatkan aparat pelaksana dari berbagai lembaga untuk menyukseskan tuntutan. Tantangannya, bagaimanapun, adalah tuntutan yang berbeda ditangani oleh divisi yang berbeda di Kejaksaan Agung (pidana khusus atau umum) dan perbedaan tipe peradilan (misalnya beberapa peradilan hanya ada di lokasi-lokasi tertentu, misalnya perikanan, hak asasi manusia, korupsi, dan belum semua pengadilan negeri punya jaksa penuntut yang menangani masalah lingkungan hidup). Kedua, sertifikasi lingkungan hidup untuk jaksa tidak termasuk kasus kelautan, kasus ini termasuk dalam program sertifikasi yang berbeda. Ketiga, tidak ada pelatihan sektor peradilan yang terintegrasi atau pendekatan untuk melakukan pengelolaan semua kasus lingkungan hidup atau untuk melaksanakan pendekatan “*multi-door*”.<sup>15</sup>

Selain pengaturan kerjasama dengan badan yang menangani korupsi (KPK) atau pencucian uang (PPATK) mewakili terobosan hukum yang mungkin akan memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa kejahatan satwa liar. Terlebih lagi, kejahatan terhadap satwa liar dan kehutanan tidak dapat digugat secara perdata (sebagai tipe kejahatan administratif), yang akan memungkinkan pemerintah untuk menuntut pihak lain, misalnya ketika pemegang izin tidak dapat melindungi spesies yang dilindungi, atau tidak dapat menjunjung upaya perlindungan lingkungan hidup, atau gagal melaksanakan upaya perlindungan lingkungan yang disebutkan dalam rencana pengembangan mereka.

#### Peningkatan pertukaran informasi dan pengelolaan data

Data dan informasi memainkan peranan penting dalam penegakan hukum yang sukses. Protokol pertukaran informasi perlu untuk dikembangkan di tingkat nasional dan internasional. Pertukaran data intelejen harus dapat dilakukan pada tingkat internasional melalui pengembangan perjanjian kolaborasi bilateral dan regional (seperti ASEAN-WEN) dan internasional (CITES, ICPO-Interpol dan Organisasi Bea Cukai Internasional). Kerjasama diantara lembaga penegakan hukum harus diperkuat. Perbaikan dan sistem database bersama antar badan, termasuk contoh standar pengumpulan data/protokol pertukaran informasi, dan sistem peringatan, akan mendukung kolaborasi ini. Selain itu,

---

<sup>15</sup> Sektor peradilan dapat mengambil contoh dari kasus anak dibawah umur, sebagaimana sistem terintegrasi dan pendekatan pelatihan untuk kepolisian, jaksa dan hakim dalam menangani kasus anak dibawah umur yang baru-baru ini diterapkan Pemerintah Indonesia.

penggunaan sistem internasional yang ada, seperti Eco Message dari ICPO-Interpol dan Peringan CITES akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum di level nasional.

Sistem pertukaran informasi juga harus mencakup masukan dari masyarakat, seperti penyidikan, bukti, keluhan, masukan, dll, dan juga harus menyediakan informasi penting kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

### Peningkatan kerjasama bilateral, regional dan internasional

Indonesia harus memprioritaskan pengembangan hubungan yang kuat dengan daerah untuk memfasilitasi penggeledahan, investigasi dan repatriasi bukti ketika ditemukan di negara lain. Perjanjian ekstradisi bersama untuk tersangka kejahatan terkait satwa liar dan kehutanan antara negara pembeli/penjual penting ketika tersangka ditahan diluar negeri harus dijajaki.

## **Mencocokkan tantangan dan rekomendasi**

Untuk menambah analisa tabel dibawah ini mencocokkan tantangan dan kemungkinan intervensi yang dilakukan yang telah dibahas dibagian sebelumnya

<b>Fokus</b>	<b>Kesenjangan/Tantangan Utama</b>	<b>Tindakan yang mungkin diambil</b>
<b>Cakupan Hukum</b>	PP No. 7/1999 dibawah UU No. 5/1990 usang dan lemah, sehingga gagal untuk melindungi spesies yang ada di daftar CITES, dan spesies lainnya yang dikhawatirkan terancam punah di Indonesia	Revisi PP No, 7/1999, Daftar Spesies yang Dilindungi, agar sesuai dengan CITES dan sesuai dengan taksonomi yang benar. Hal ini bisa dilakukan melalui keputusan menteri, tapi belum pernah dilaksanakan. Revisi dari undang-undang ini dapat memungkinkan update otomatis seiring dengan perkembangan CITES.
	Peraturan hanya berlaku untuk spesies yang dilindungi, dan tidak mengatur perdagangan spesies yang tidak dilindungi, atau termasuk ketentuan untuk spesies yang bukan asli Indonesia tapi dilindungi oleh CITES.	Revisi harus mempertimbangkan spesies kedalam tiga klasifikasi status: (1) spesies yang dilindungi dan terancam punah dan semua yang ada di Appendix I CITES; (2) Spesies yang diatur dengan ketat, termasuk spesies yang rentan untuk diperdagangkan dan spesies di Appendix II CITES; dan (3) spesies yang perdagangannya harus diawasi. Semua kategori spesies harus diatur dengan baik, termasuk ketentuan larangan, sanksi dan penyitaan. Amandemen ini hanya bisa dilaksanakan melalui revisi UU No. 5/1990.
	Keterbatasan perlindungan hukum bagi species dilindungi yang ada di luar kawasan yang dilindungi	Setiap revisi harus dapat melarang dan menghukum perusakan habitat spesies yang dilindungi, dan harus mempunyai ketentuan untuk tuntutan tindakan yang dilakukan di dalam dan diluar area yang dilindungi. Hal ini mencakup area konsesi seperti konsesi kayu dan pertambangan. Salah satu pilihan adalah amandemen pada No. 5/1990 memberikan defnisi "minimum habitat kritis" untuk pelestarian dari spesies yang dilindungi di Indonesia, seperti yang terdaftar dalam UU ini. Hal ini membutuhkan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dan ilmiah, seperti LIPI, untuk megembangkan metode yang tepat untuk memberikan definisi area habitat dan perlindungan diluar area yang bergantung pada sumber daya dan pedoman pengelolaan mereka.
<b>Deteksi dan Pelaporan</b>	Deteksi kejahatan minim	Peningkatan kemitraan komunitas polisi hutan untuk melakukan patroli di dan sekitar area yang dilindungi, dan target khususnya area yang rentan. LSM, CSO dan kolaborasi paralegal juga dibutuhkan.
		Peningkatan jumlah unit intelejen dalam SPORC dan Unit

		<p>Pelaksana Teknis</p> <p>Peningkatan kehadiran dan kapasitas keamanan pelabuhan/bea cukai di pelabuhan udara/air yang rentan dan pasar, dan memberdayakan penyidik sipil untuk berada di lokasi tersebut.</p> <p>Perbaiki pelatihan deteksi untuk aparat pelabuhan/bea cukai termasuk melalui kemitraan dengan penyidik sipil.</p>
	Pengetahuan/pelatihan untuk aparat pelaksana tidak cukup	<p>Perbaiki pelatihan untuk teknik pelaksanaan dan proses yang efektif termasuk melalui kerjasama dengan penyidik sipil.</p> <p>Perbaiki koordinasi institusi antara badan yang relevan, termasuk bea cukai, perlindungan satwa liar, karantina, polisi dan penyidik sipil.</p>
	Sanksi tidak cukup bagi aparat pemerintah yang tidak melakukan tugas dengan baik.	Amandemen UU No. 5/1990 perlu merinci sanksi kepada aparat yang gagal bertindak tepat. Atau memperbaiki monitoring dan pengawasan aparat, dan mengembangkan sanksi institusional karena kinerja buruk melalui ketentuan "kode etik"
	Terbatasnya tindak lanjut pada informasi yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar	Menetapkan hotline perdagangan, baik dalam level nasional dan setiap provinsi. Audit independen harus melakukan identifikasi laporan, lokasi, tingkat tindak lanjut, waktu respon, dan hambatan dalam tindak lanjut.
	Jumlah Polisi Hutan, PPNS dan SPORC tidak cukup jika dibandingkan dengan luas area hutan.	Diselesaikan melalui kebijakan pemerintah pusat, kemungkinan dibantu dengan keputusan menteri. Isu yang berhubungan adalah hak dan tunjangan bagi pekerja di bidang penegakan hukum.
<b>Penangkapan dan Penahanan</b>	PPNS Kehutanan tidak dapat melakukan penangkapan tersangka kejahatan terhadap satwa liar. Hal ini hanya dilakukan oleh polisi.	Mandat hukum dari PPNS Kehutanan dapat diperbesar dengan revisi UU No. 5/1990. UU ini harus secara khusus mengatur dan memberi kewenangan PPNS Kehutanan untuk melakukan penangkapan dan menahan tersangka kejahatan terhadap satwa liar dengan atau tanpa polisi. Namun, PPNS harus mengikuti prosedur pidana, kebijakan kepolisian, dan perlindungan hukum bagi tersangka.
	Proses hukum yang tidak tepat sering terjadi setelah penangkapan atau penahanan, yang dapat menyebabkan kasus batal.	Dukungan hukum yang lebih baik selama tahap penahanan/penyidikan (misal. model WCS Wildlife Crime Unit) yang menjamin prosedur yang tepat diikuti dan rasio penangkapan ke peradilan meningkat. Intinya, sumberdaya pemerintah harus dialokasikan pada pelatihan yang menjamin penyidik dan polisi hutan mengikuti proses hukum yang benar selama tahap penangkapan dan penahanan.
	Penyidik polisi dan jaksa penuntut kurang mempunyai pengetahuan teknis.	Diperlukan fokus yang berkelanjutan dan ditargetkan untuk pembangunan kapasitas dan perbaikan koordinasi diantara polisi, penyidik sipil dan jaksa, khususnya terkait dengan kejahatan dan perdagangan satwa liar, spesies yang dilindungi, lingkungan dan keuntungan ekonomi dai spesies, dan berbagai UU dan peraturan yang relevan dan tepat harus diaplikasikan.
	Penangkapan tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah, dan tidak dapat bertahan lebih dari 24 jam kecuali pelanggaran yang terjadi dapat dihukum lebih dari 5 tahun atau lebih.	Revisi UU No. 5/1990 atau peraturan pendukung untuk menghukum kejahatan terhadap satwa liar dengan hukuman yang lebih berat, pergeseran ke praduga bersalah ketika individu ditemukan mempunyai satwa liar dan bagian satwa liar untuk membuktikan bahwa kepemilikan barang adalah sah, memungkinkan penahanan yang lebih lama dimana terdapat bukti yang cukup untuk kejahatan terhadap satwa liar, dan memberdayakan penyidik sipil untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersangka.
	Penyeliidikan online perdagangan satwa liar terbatas dan dibatasi hanya untuk penyidik tanpa keahlian di perdagangan satwa liar	Memperluas wewenang penyidik kehutanan untuk mengejar kasus yang diatur UU No. 11/2008 dan menjajaki amandemen klausa yang mencakup rujukan khusus ke kejahatan terhadap satwa liar. Memperbolehkan penggunaan foto yang sudah divalidasi, video atau dokumen elektronik sebagai barang bukti untuk kejahatan terhadap satwa liar, kehutanan dan kelautan.
<b>Pendaftaran Kasus dan</b>	Rendahnya hukuman untuk kejahatan terhadap	Hukuman maksimum yang ada jarang diberikan dalam kasus kejahatan terhadap satwa liar. Namun, hukuman maksimum

<b>Tuntutan</b>	satwa liar.	harus ditingkatkan dan pemberian hukuman minimum dibatasi. Diperlukan pedoman pemberian hukuman dengan arahan yang spesifik dan batasan untuk jaksa dan pengadilan tergantung pada sifat kejahatan. Perbaikan pedoman dan pelatihan penyidik dan jaksa akan membantu pemberian hukuman yang tepat dan konsisten. Pendekatan <i>multi-door</i> dalam tuntutan juga harus diaplikasikan untuk pelanggaran satwa liar, dimana berbagai tuntutan diberikan pada terdakwa dan membuka kemungkinan untuk memberikan hukuman yang lebih berat.
	Menentukan kerugian Negara agar bisa digunakan polisi atau jaksa sebagai dasar untuk menentukan sejauh mana tuduhan terhadap terdakwa.	Perbaikan pedoman untuk menentukan kerugian satwa liar terhadap Negara, termasuk penilaian ekosistem, dampak pada komunitas local dan kerugian di masa datang, seperti banjir dan kekeringan, dll, dibanding hanya menghitung harga pasar.
	Terbatasnya kolaborasi dengan polisi/militer dalam penuntutan kejahatan terhadap satwa liar.	Ketika ada kecurigaan kejahatan terhadap satwa liar terjadi di kepolisian dan militer, maka pimpinan kepolisian dan militer harus diminta memeriksa kasus. Peradilan terhadap anggota militer harus dilakukan di pengadilan militer, tapi peradilan sipil harus tetap ada di pengadilan negeri.
	Kurangnya kolaborasi antara polisi hutan, penyidik sipil, polisi dan publik.	Polisi hutan harus diberikan kewenangan lebih, sebanding dengan penyidik kepolisian, untuk melakukan pengeledahan atau melakukan penangkapan pada kejahatan terhadap satwa liar. Penyidik sipil juga direkomendasikan untuk berdaya dalam berkoordinasi dengan penyidik lain, seperti pada pelabuhan domestik dan internasional. Penyidik PNS dari KLHK harus bisa melakukan korespondensi langsung dengan jaksa penuntut untuk memfasilitas tuntutan yang efisien. Beberapa dari amandemen ini dapat dicapai melalui revisi UU No. 32/2009. Peningkatan berbagi data satwa liar, pengelolaan dan kinerja informasi, informasi publik, dan partisipasi publik juga sangat penting.
<b>Implementasi dan Pelaksanaan</b>	Konflik antara UU kelautan dan tanah dimana terdapat mandat yang tumpang tindih.	UU Konservasi No. 5/1990 dan UU Perikanan No.31/2014 keduanya mempunyai ketentuan mengenai spesies yang dilindungi. Hal tumpang-tindih ini menciptakan kesenjangan. Peraturan turunan dibawah UU No.5/1990 (PP No. 7/1999 dan No. 8/1999) dianggap sudah lebih komprehensif. Tanggung jawab harus dialokasikan (berdasar tempat dan spesies) untuk memastikan kesenjangan diminimalisir, (mungkin melalui keputusan menteri) dan kewenangan badan harus dijelaskan. Setiap revisi PP No. 7/199 mengenai daftar spesies dilindungi di laut dan darat juga harus memperhitungkan tumpang-tindih antara UU No. 5/1990 dan UU No. 31/2004. Definisi ikan dalam UU No. 31/2004 harus direvisi agar benar secara taksonomi.
	Tidak ada konservasi legal untuk spesies yang dilindungi diluar area yang dilindungi.	Hal ini sangat penting dalam perlindungan spesies penting di Indonesia, karena terdapat banyak satwa, khususnya yang tinggal di hutan dataran rendah, misal Orangutan, populasinya berada diluar area yang dilindungi. Amandemen UU juga harus memastikan perlindungan spesies yang terancam punah diluar area yang dilindungi.
	Terbatasnya penggunaan hukum adat dan praktek untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan melaksanakan batasan lokal untuk perdagangan satwa liar.	Pertimbangan kearifan lokal yang ada, peraturan dan hukum yang mendukung konservasi akan mendukung pencegahan kejahatan terhadap satwa liar dan penggunaan yang berkelanjutan. Peningkatan kolaborasi dan keterlibatan komunitas lokal akan membantu penyidik lokal, tapi hal ini harus dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan perkembangan masyarakat dan pendidikan di sekolah, pelatihan paralegal masyarakat, dan media.
	Kuota yang diperbolehkan secara legal untuk memanen spesies yang terdaftar di CITES tidak dipantau dengan baik.	Terdapat kurangnya data untuk menentukan kuota secara ilmiah untuk banyak spesies. Kesenjangan data harus diatasi melalui penelitian dan monitoring. Lembaga yang berwenang untuk hal ilmiah harus melakukan koordinasi pengambilan data dari mitra, dan menargetkan kesenjangan data secara strategis untuk memastikan kuota tepat dan responsif. Pelaksanaan juga penting, dan bisa diperbaiki melalui banyak tahapan diatas.

## KESIMPULAN

Terdapat sejumlah peluang penting yang ada untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Walaupun reformasi hukum diperlukan untuk memberikan dasar yang solid dimasa datang untuk upaya pelaksanaan dan untuk memastikan bahwa kerangka hukum Indonesia masih mampu untuk menanggulangi kejahatan yang berkembang pesat dan makin canggih ini, banyak juga yang bisa segera dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan dan meningkatkan tingkat kesuksesan tuntutan kejahatan jenis ini. Kesuksesan skala besar yang terjadi baru-baru ini, seperti penyitaan lebih dari 7,000 kura-kura hidung babi dari pelabuhan Indonesia yang bertujuan ke Cina,<sup>16</sup> sebagian besar adalah hasil perbaikan hubungan dan kerjasama antara bea cukai, kepolisian dan penyidik PNS. Kesuksesan seperti itu adalah indikasi dampak yang cepat dalam perbaikan upaya pelaksanaan dan, dengan kombinasi dengan reformasi hukum yang ditargetkan dan dibahas dalam laporan ini, akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan terobosan yang kuat dalam mengurangi kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan satwa liar di masa mendatang.

---

<sup>16</sup> <http://www.traffic.org/home/2015/1/23/more-than-2300-turtles-seized-at-jakarta-international-airpo.html>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhadi, R., E.E. Widjaja, Y. Rahayuningsih, R. Ubaidillah, I. Maryanto & J.S. Rahajoe (eds.). 2014. *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*. The Indonesian Institute of Sciences-National Development Planning Agency-Ministry Of Environment, Jakarta.
- Asshidiqie, J.A. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-empat*. Center for Constitutional Law Study, Faculty of Law, University of Indonesia, Depok
- Directorate of Forestry Investigation and Forest Protection, 2014. *Statistik Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan 2013 (Statistics of the Directorate of Forestry Investigation and Protection 2013)*. Jakarta (unpublished).
- Dursin, K. 2004. Animal trade thrives amid crackdown. *The Jakarta Post*, March 5, 2004.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Forest Watch Indonesia, Bogor.
- Forest Watch Indonesia/Global Forest Watch. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Forest Watch Indonesia, Bogor.
- Forest Protection and Nature Conservation. 2013. *Statistik PHKA 2013*. Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation-Ministry of Forestry, Jakarta
- Groombridge, B. and Luxmoore, R. (1991). *Pythons in South-East Asia. A Review of Distribution, Status and Trade in Three Selected Species*. CITES Secretariat: Lausanne.
- IFAW, 2014. *Combating Wildlife Trafficking by Building Law Enforcement Capacity*. <http://www.ifaw.org/international/news/combating-wildlife-trafficking-building-law-enforcement-capacity>
- IUCN, 1980. *The World Conservation Strategy*. Gland, Switzerland
- IUCN 2014. *IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3*. <[www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)>. Downloaded on 08 December 2014.
- Kurniawan, M.N. 2003. Police, military told to curb animal smuggling. *The Jakarta Post*, March 29, 2003.
- Leksono, S.M. 2000. *Kawasan Konservasi di Sumatera: Ancaman, Keterwakilan Ekosistem, Perkembangan, Distribusi, Percancangan, dan Pengelolanya*. Unpublished Magister Thesis, University of Indonesia, Depok.
- Lyons, J, Natusch, D (2011)'Wildlife laundering through breeding farms: Illegal harvest, population declines and a means of regulating the trade of green pythons (*Morelia viridis*) from Indonesia'. *Biological Conservation*, Vol. 44 (12) 3073–3081.
- Ministry of Forestry and Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2010), "Analysis on Gaps of Ecological Representativeness and Management of Protected Areas in Indonesia", Jakarta: Ministry of Forestry and Ministry of Marine Affairs and Fisheries
- Mittermeier, R.A., P.R. Gil & C.G. Mittermeier. (Eds.). 1997. *Megadiversity: Earth's Biologically Wealthiest Nations*. CEMEX, Mexico.
- Mongabay.co.id, 2013. 43 Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup Ditangani dengan Penegakan Hukum Terpadu (Environmental Crime Cases Treated with Integrated Law Enforcement) ed. May 22, 2013 Sapariah Satri. <http://www.mongabay.co.id/2013/05/22/43-kasus-kejahatan-lingkungan-hidup-ditangani-dengan-penegakan-hukum-terpadu/>
- National Development Planning Agency. 2003. *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020*. National Development Planning Agency, Jakarta.
- Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash, N., & E. Mrema, E. (Eds). 2014. *The Environmental Crime Crisis – Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources. A UNEP Rapid Response Assessment*. United Nations Environment Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal.

- Nursahid, 2003. Law enforcement on Indonesia's wildlife. Proceedings of Indonesia's Wildlife Seminar. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, Jakarta
- Projodikoro, W. (2003). Azas-azas Hukum Pidana Indonesia (Principles of Indonesia Criminal Law). Refika Aditama. Bandung.
- Rosser, A and Haywood, M. 2002. The IUCN Species Survival Commission Guidance for CITES
- Sadikin. 2009. Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya Dengan Program Legislasi Nasional. Presented paper on the Focus Group Discussion of Optional Protocol of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, 6 Oktober 2009. Scientific Authorities, Checklist to assist in making non-detriment findings for Appendix-II exports. Occasional Paper of the IUCN Species survival Commission No. 27
- Shine, R., Ambariyanto, Harlow, P.S. and Mumpuni (1998d). Ecological traits of commercially harvested water monitors, *Varanus salvator*, in northern Sumatra. *Wildl. Res.* 25: 437-447.
- Shine, R., Ambariyanto, Harlow, P.S. and Mumpuni (1998e). Ecological divergence among sympatric colour morphs in blood pythons, *Python brongersmai*. *Oecologia* 116: 113-119.
- Shine, R., Ambariyanto, Harlow, P.S. and Mumpuni (1999a). Reticulated pythons in Sumatra: biology, harvesting and sustainability. *Biol. Cons.* 87: 349-357.
- Shine, R., Harlow, P.S., Ambariyanto, Boeadi, Mumpuni and Keogh, J.S. (1998a). Monitoring monitors: a biological perspective on the commercial harvesting of Indonesian reptiles. *Mertensiella* 9: 61-68.
- Shine, R., Harlow, P.S., Keogh, J.S. and Boeadi (1998b). The allometry of life-history traits: insights from a study of giant snakes (*Python reticulatus*). *J. Zool., Lond.* 244: 405-414.
- Shine, R., Harlow, P.S., Keogh, J.S. and Boeadi (1998c). The influence of sex and body size on food habits of a giant tropical snake, *Python reticulatus*. *Functional Ecology* 12: 248-258.
- Shepherd, Chris R. and Bonggi Ibarondo (2005), The Trade Of The Roti Island Snake-necked Turtle *Chelodina mccordi*. TRAFFIC Southeast Asia
- Soeprapto, M.F.A. 1998. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya. Kanisius, Jakarta.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 1985. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press, Jakarta.
- TFCA-Sumatera, 2013. January-June Six Monthly Report of TFCA Sumatera. Unpublished.
- Webb, G.J.W., Vardon, M.J. and Boeadi. (1996). An assessment of the harvest levels and status of three species of reptile (*Varanus salvator*, *Python reticulatus* and *P. curtus*) in Indonesia. Pp. 75-82 in Proceedings of the First International Conference on Eastern Indonesia-Australian Vertebrate Fauna. Manado, Indonesia, 22-26 November 1994.
- Wiriadinata, H. 1995. Gaharu, *Aquillaria* spp. Perkembangan dan pemanfaatan berkelanjutan. Lokakarya perusahaan hasil hutan non kayu Indonesia. Surabaya, 31 July-1 August 1995.
- Wijnstekers, W. (2011): The Evolution of CITES - 9th edition. International Council for Game and Wildlife Conservation. Hungary
- Wyler, L. S. and Sheikh, P.A (2013) International Illegal Trade in Wildlife: Threats and U.S. Policy. Congressional Research Service.
- Zich, F. and Compton, J., 2001. The Final Frontier: Towards Sustainable Management of Papua New Guinea's Agarwood Resource. TRAFFIC Oceania and the WWF South Pacific, Sydney.

## LAMPIRAN

### Ringkasan kasus kejahatan terhadap satwa liar dan hasilnya

No	Kasus Nomor	Terdakwa	Ringkasan Kasus
1	277/Pid/Sus/2014/PN.BKS	Pria, Swasta, 32 tahun, BEKASI, Jawa Barat Penangkapan : 20 Jan 2014 Penahanan : 21 Jan 2014 Sidang : 24 Feb 2014 Putusan : 29 Apr 2014	<b>UU No.5/1990</b> <i>Pasal 21 (2a) dan Pasal 40 (2): “Memelihara atau memperdagangkan satwa liar hidup yang dilindungi”</i>  <i>Bukti:</i> Owa Jawa (1 ind), Lutung Jawa (2 inds), <i>Dakwaan:</i> 2 tahun di penjara dan denda Rp. 100 juta ATAU 2 bulan di penjara <i>Putusan:</i> Bersalah, 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp. 100 juta ATAU 1 bulan penjara, Biaya sidang Rp. 2,000; bukti disita dan diserahkan pada Kementerian kehutanan.  Pada 20 Januari 2014, terdakwa tertangkap polisi saat sedang mempersiapkan paket Owa Jawa (1 ind) dan Lutung Jawa (2 ind), untuk dikirim ke pembeli di Bali dengan bus. Pembeli telah transfer Rp. 4 juta untuk kedua paket tersebut. Pembeli dalam kasus ini diperlakukan sebagai saksi, bukan terdakwa; tidak ada peraturan untuk menentukan hukuman pengganti denda.
2	55/Pid.B/2014/PN Tkn	Pria, Polisi, 36 tahun, ACEH TENGAH Penangkapan: 03 Jan 2014 Penahanan : 23 Apr 2014 Sidang : 2 Mei 2014 Putusan : 23 Jun 2014	<b>UU No.5/1990</b> <i>Pasal 40 (2) dan Pasal 21 (2d), “Menyimpan kulit dan bagian dari satwa liar yang dilindungi”</i>  <i>Bukti :</i> 1 spesies harimau Sumatrea yang sudah mati ( <i>opgezet</i> ), 1 Macan Dahan yang sudah mati <i>Dakwaan:</i> 1,5 tahun penjara dan denda Rp. 25 juta ATAU 4 bulan di penjara <i>Putusan:</i> Bersalah, 1 tahun penjara, denda Rp. 10 juta ATAU 4 bulan penjara biaya sidang Rp. 5,000; Bukti disita dan diserahkan kepada BKSDA Aceh, Kementerian Kehutanan.
3	56/Pid.B/2014/PN Tkn	Pria, pengusaha, 39 tahun, ACEH TENGAH Penangkapan: 03 Jan 2014 Penahanan : 04 Jan 2014 Sidang : 02 Mei 2014 Putusan : 23 Jun 2014	<b>UU No.5/1990</b> <i>Pasal 40 (2) dan Pasal 21 (2d), “Menyimpan kulit dan bagian dari satwa liar yang dilindungi”</i>  <i>Bukti :</i> 1 Kepala Harimau Sumatera yang sudah mati ( <i>opgezet</i> ), 2 Kucing Emas yang sudah mati, 1 Kambing Hutan yang sudah Mati, 6 gigi beruang madu, 1 buah kulit beruang madu, 1 buah kulit kucing hutan, 1 kepala Kijang, 1 kepala Rangkok <i>Dakwaan:</i> 1,5 tahun penjara dan denda Rp. 25 juta ATAU 4 bulan penjara <i>Hukuman:</i> Bersalah, 1 tahun penjara, denda Rp. 100 juta ATAU 4 bulan penjara, biaya sidang Rp. 5,000; Bukti disita dan diserahkan kepada BKSDA Aceh, Kementerian Kehutanan. Kasus ini memperlihatkan tidak ada pedoman dasar untuk menentukan hukuman tambahan untuk menggantikan denda.
4	163 K/Pid/1999 (Kejaksaan Agung)	Pria, 35 tahun, PNS, JAYAPURA  Penahanan : tidak ditahan Kasus Diidentifikasi: 21 Apr 1998 Putusan : 22 Des 1998 Pengajuan Banding: 29 Des	<b>UU No.5/1990</b> <i>Pasal 40 (2) dan Pasal 21 (2a dan 2b), “Memiliki dan menyimpan satwa liar yang dilindungi”</i>  <i>Bukti :</i> 5 pasang Cendrawasih, 1 cendrawasih belah rotan, 1 Jalak Bali, 2 Bayan merah, 1 kakatua kelapa, 2 rangkong betina, 1 kakatua putih, 2 elang buah, 4 mambruk, 1 burung kelapa, 2 kasuari, 1 mambruk emas, 1 kangguru pohon, 3 kangguru tanah, 1 buaya, 1 kuskus, dan 1 cendrawasih mati.

		<p>1998  Memori Banding : 07 Jan  1999  Putusan MA : 15 Des 1999</p>	<p><i>Dakwaan:</i> 3 bulan dengan 1 tahun masa percobaan, dan denda Rp. 3 juta ATAU 3 bulan penjara.  <i>Putusan di Pengadilan Negeri:</i> Terbukti tapi tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, dibebaskan dari tuduhan, semua barang sitaan dikembalikan ke terdakwa.  Putusan ini kasasi ke Mahkamah Agung, berdasarkan kasus awal No. 158/Pid.B/1998/PN.Jr. Mahkamah Agung menolak kasasi dan terdakwa dibebaskan.</p>
--	--	--	---